



**SEJARAH PENGARUH PELITA
TERHADAP KEHIDUPAN
MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SULAWESI SELATAN**



720959853

1106/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL	
Nomor Induk :	1106 f94
Tanggal terima :	21-1-94
Tanggal cair :	21-1-94
Beli/hadiah dari :	Kadial
Nomor buku :	307.720959 P83 Set
Kopi ke :	C4

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SELATAN
NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang disebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. A. Rasyid Mappagiling, Drs. Y. Montolalu, Drs. Pananrangi Hamid, Drs. Abdul Wahab, L.T. Tangdilinting dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Drs. Anhar Gonggong, Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Nopember 1983.

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1981/1982 telah berhasil menyusun naskah *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Selatan*.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta membem-bangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapakan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Nopember 1983.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. RUMUSAN PERMASALAHAN	1
B. TUJUAN PENULISAN	6
C. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN NASKAH	9
BAB II KEADAAN SEBELUM PELITA	11
A. KEADAAN LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK	11
1. Keadaan Lingkungan Alam	11
2. Keadaan Penduduk	21
B. KEADAAN PENDIDIKAN	22
1. Pangli Palawa	22
2. Sesean Suloara	22
3. Sedan Matallo	23
4. S o m p e	23
5. Anabanua	24
6. Tancung	25
7. Gattareng	25
8. Dampang	25
9. Matekko	26
C. STRUKTUR PEMERINTAHAN	26
1. Pangli Pallawa	26
2. Sesean Suloara	27
3. Sadan Matallo	27

4.	S o m p e	28
5.	Anabanua	29
6.	Tancung	29
7.	Gattareng	30
8.	Dampang	31
9.	Matekko	32
D.	CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA	33
1.	Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo	33
2.	Sompe, Anabanua dan Tancung	34
3.	Gattareng, Dampang dan Matekko	34
E.	KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH	35
1.	Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo	35
2.	Sompe, Anabanua dan Tancung	35
3.	Gattareng, Dampang dan Matekko	37
F.	KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN PEMERINTAH	38
1.	Pangli Palawa	38
2.	Sesean Suloara	39
3.	Sadan Matallo	39
4.	Sompe	39
5.	Anabanua	40
6.	Tancung	41
7.	Gattareng	42
8.	Dampang	43
9.	Matekko	43
G.	KEADAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN	44
1.	Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo	44

2. Sonpe, Anabanua dan Tancung	46
3. Gattareng, Dampang dan Matekko	48
H. KEADAAN SOSIAL BUDAYA	49
1. Pelapisan Sosial	49
2. Kehidupan dengan Berbagai Ritus	55
3. Gotong Royong	57
BAB III PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG	
PEMERINTAH DESA	58
A. LANDASAN PELAKSANAANNYA	58
B. PELAKSANAAN DI DAERAH	63
C. HASIL YANG DIPEROLEH	65
1. Pangli Palawa	66
2. Sesean Suloara	67
3. Sadan Matailo	67
4. S o m p e	68
5. Anabanua	68
6. Tancung	69
7. Gattareng	69
8. Dampang	70
9. Matekko	71
BAB IV PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG	
PEMERINTAHAN DESA	73
A. STRUKTUR PEMERINTAHAN	74
B. CARA PEMILIHAN APARAT PEMERINTAHAN	
DESA	79
C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN	
MASYARAKAT NON-PEMERINTAH	83
D. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON	
POLITIK	87
BAB V P E N U T U P	91
A. RANGKUMAN ISI	91
B. KESIMPULAN	95
DAFTAR BACAAN	98

BAB I PENDAHULUAN

Adalah menjadi kenyataan, bahwa PELITA itu merupakan rahmat bagi desa dan pedesaan. Ungkapan ini didasari atas pemikiran sejarah dengan melihat wajah desa sebelum PELITA. Bayangan-bayangan pikiran tentang wajah desa sebelum dikenal pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pembaharuan di dalamnya, mungkin agak mengecewakan jika kita mengatakan, bahwa desa pada eksistensinya kurang mendapat perhatian, kini telah lain keadaannya, kini sedang bergerak secara perlahan-lahan dengan bagian-bagian dari anggota badannya yang seringkali tidak bekerja sama, bahkan sebagiannya bertentangan satu sama lain. Keterbelakangan mereka tinggalan, tempatnya beristirahat sekian lama, sebagian bekas-bekas masih ikut serta dan mengalami keguguran di perjalanan, menuju suatu arah menyongsong alam fauna dan flora yang lebih makmur dan damai. Demikian ungkapan sebagai pembuka dari karya ini.

Kemudian ungkapan lain akhir-akhir ini sebagai akibat kegairahan membangun desa, dikatakan "desa dijadikan kota dan kota didesa-kan". Ucapan ini memang merupakan ungkapan, jika ia sebagai ucapan biasa adalah suatu hal yang berlebihan, seolah-olah sebentar lagi akan kita lihat tidak ada desa dan tidak ada pula kota, semua adalah desa dan semua adalah kota. Konsep pembangunan dari suatu segi tertentu, bahwa kota adalah pusat fasilitas dan desa adalah pusat sumber-sumber bahan mentah dan tenaga, agar terjadi distribusi, perimbangan pembagian tugas dan unsur-unsur kehidupan lainnya. Konsep perwilayahan menginginkan demikian, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Desa adalah desa, kota adalah kota, harus dibangun dan sesuai dengan kondisi dan tradisi budaya yang dianutnya, demikian pula kota harus dibangun menurut ciri-ciri dan tipe-tipenya dalam lingkungan tata ruang yang mengikatnya.

A. RUMUSAN PERMASALAHAN

Proses pembangunan desa mau tidak mau merupakan proses yang melibatkan perubahan dalam lembaga-lembaga dan kepranataan sebelumnya, adakalanya mengubah fungsinya, kadang-kadang menghentikan atau menggugurkan fungsi asalnya sama sekali.

Pelaksanaan PELITA di daerah pedesaan telah memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan meliputi perubahan kebiasaan, terutama kebiasaan dalam relasi sosial, bahkan sebagian norma telah terjadi pergeseran nilai dan fungsinya.

Perubahan-perubahan itu, sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang tertentu, seperti:

1. Keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga secara perlahan-lahan berkurang dan makin renggang.
2. Pelapisan masyarakat. Struktur sosial, khususnya pelapisan masyarakat telah terjadi pergeseran akibat mobilitas sosial. Prinsip keturunan yang tadinya menjadi dominan, sekarang ini bergeser ke arah penilaian terhadap karya dan prestasi.
3. Agama dan kepercayaan. Perkembangan pandangan terhadap syariat dan cabang-cabang keagamaan ke arah pandangan yang lebih berimbang antara duniawi dan akhirati.
4. Pendidikan. Perubahan orientasi terhadap pendidikan, bukan saja semata-mata pendidikan formalitas atau hanya tahu sekedar membaca, berubah orientasi ke arah pendidikan umum lebih banyak dan keterampilan serta kemampuan lebih tinggi.
5. Politik. Perubahan pandangan tentang kategori umur dan jenis kelamin dalam hal fungsi-fungsi sosial bergeser ke arah pandang, bukan saja atas dasar usia tua untuk status tertentu dalam masyarakat, demikian pula bukan saja jenis kelamin pria senantiasa menduduki jabatan tertentu, melainkan status dan jabatan-jabatan tersebut dapat diduduki oleh usia muda dan wanita yang memenuhi syarat mutu pendidikan dan keterampilan.

PELITA I adalah meningkatkan struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian, sehingga pada Repelita pertama adalah meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Repelita kedua meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga, meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Repelita tersebut membuktikan, bahwa peningkatan ekonomi khusus sektor pertanian tidaklah terlepas dari perubahan di bidang

sosial, politik dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi tidak merupakan suatu perkembangan yang berdiri sendiri, akan tetapi pembangunan ekonomi itu saling berkait dengan bidang lain dalam masyarakat. Pembangunan faktor-faktor ekonomi akan ditunjang oleh faktor-faktor non-ekonomik, oleh karena faktor-faktor non-ekonomik yang berupa kebiasaan upacara itu, apabila sudah terbiasa dilakukan oleh anggota masyarakat akan merupakan kebutuhan biasa, maka mereka membutuhkan barang dan benda yang harus disiapkan, berarti turut meningkatkan kebutuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu sendiri terjadi perubahan, khususnya interelasi individu, jika sistem produksi dari *subsistence* oleh *peasant* berubah menuju produksi untuk pemasaran. Perubahan ini pada berbagai hal berarti pemisahan kegiatan ekonomi dari pola tradisional seperti sebelumnya.

Akibat dari peningkatan produksi, maka petani keluarga tidak dapat lagi bekerja seandainya menurut waktu yang dikehendakinya, akan tetapi harus menyesuaikan dirinya dengan tuntutan pasaran. Sistem produksi tradisional, petani hanya memproduksi untuk konsumsi keluarga atau desanya, maka sistem produksi modern menghendaki mutu produksi sesuai dengan selera konsumen yang berubah-ubah.

Pelaksanaan Pelita di desa, datang dengan berbagai macam bantuan dari pemerintah atasan desa, seperti dari pemerintah pusat berupa Inpres, demikian pula adanya proyek-proyek yang dikendalikan oleh pemerintah dan bimbingan-bimbingan massal khususnya di bidang pertanian. Demikian bantuan kepada desa-desa, terdapat Inpres desa, di samping Inpres kabupaten.

Khusus pelaksanaan Pelita di bidang pertanian, sebagaimana sasaran pokoknya ialah peningkatan produksi pangan, maka dilaksanakan proyek pembangunan pertanian pangan dan Proyek Pembangunan Daerah, misalnya:

- Pengembangan teknologi terapan
- Pengembangan benih/bibit dan produksi
- Pengembangan usaha perlindungan
- Pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam
- Pengembangan mekanisme pertanian
- Pengembangan administrasi pembangunan
- Pengembangan tata penyuluhan
- Pengembangan tanaman tanam kering

Irigasi reklamasi sederhana

Kemudian Proyek Pembangunan Daerah diusahakan sebagai latar belakang dari pembangunan pertanian, seperti:

Proteksi tanaman

Produktivitas tanah

Pilot pengembangan usaha tani

Demonstrasi benih unggul kacang hijau

Pengembangan pemakaian pompa air

Pengembangan tanaman hortikultura.

Kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan daerah pada pokoknya meliputi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi dan yang dilaksanakan dalam rangka tugas *medebewind*. Dana Inpres merupakan bantuan keuangan yang diberikan langsung kepada pemerintah daerah atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pembangunan sebagai tugas *medebewind*. Bantuan tersebut diberikan untuk mempercepat laju pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di samping itu, usaha peningkatan pembangunan di daerah, maka masing-masing daerah berusaha pula meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan sendiri, agar supaya ketergantungan dana dari pemerintah pusat berangsur-angsur dapat dikurangi, sehingga pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab sungguh-sungguh dapat direalisasi.

Sejak Pelaksanaan Pelita I sampai tahun 1975/1976 ada empat jenis Inpres yang diserahkan kepada kabupaten, yaitu:

1. Bantuan pembangunan desa
2. Bantuan pembangunan kabupaten
3. Bantuan pembangunan S.D.
4. Bantuan pembangunan Sarana Kesehatan

Bantuan Inpres desa dimaksudkan untuk merangsang dan mengembangkan inisiatif daerah-daerah, khususnya pembangunan di desa. Bantuan ini diharapkan dapat memancing swadaya masyarakat sebagai salah satu sumber dan daya bagi pembangunan.

Berbeda halnya dengan Inpres bantuan pembangunan kabupaten dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi pada tingkat kabupa-

ten. Jumlah bantuan tiap kabupaten didasarkan atas jumlah penduduk. Ditetapkan jumlah bantuan minimum bagi kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk yang minim. Besarnya bantuan, tiap tahun ditingkatkan sesuai dengan perkembangan penduduk dan sesuai pula dengan kemampuan keuangan negara.

Bantuan Inpres SD adalah bantuan langsung kepada kabupaten atas beban APBN untuk meningkatkan pendidikan di SD. Tujuan bantuan ini adalah untuk mempercepat peningkatan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah yang belum tertampung pada sekolah-sekolah dasar yang ada. Melalui bantuan ini pula, rehabilitasi sekolah-sekolah dan buku-buku pelajaran pokok serta buku bacaan, di dalamnya juga termasuk bantuan pengadaan guru.

Sama halnya dengan Inpres bantuan kesehatan merupakan bantuan langsung kepada kabupaten atas beban APBN untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata kepada masyarakat, terutama penduduk yang berada di pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Selain itu, dimaksudkan pula untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hegiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat desa.

Melalui bantuan Inpres dan semua proyek-proyek pembangunan di pedesaan membawa akibat-akibat terhadap masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan itu adakalanya tidak merangsang partisipasi dan sebagiannya pula tidak diterima oleh anggota masyarakat. Akan tetapi dalam penilaian umum, bahwa pembangunan sungguh-sungguh memberi pengaruh terhadap kehidupan pedesaan. Kenyataan-kenyataan menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan, tentunya berbeda-beda di masing-masing desa. Dalam perbedaan itu, terdapat kecenderungan untuk memberikan prioritas pertama menurut tingkat kebutuhan yang segera diperlukan oleh mereka sebagai kebutuhan terasa, seperti:

1. Jalan desa
2. Sekolah (sarana pendidikan)
3. Poliklinik (sarana kesehatan)
4. Jembatan (sarana produksi dan transportasi)
5. Mesjid/mushalla (sarana sosial)
6. Pengairan (sarana produksi)
7. Jamban keluarga (sarana kesehatan/kesejahteraan)
8. Pembibitan (sarana produksi)

9. Listrik desa (sarana kesejahteraan)
10. Kantor/Balai desa (sarana pemerintahan)
11. Pasar (sarana ekonomi).

Kebutuhan terasa seperti proyek-proyek tersebut di atas, sudah dibangun pada semua desa (desa sampel) dan akibatnya telah mengantarkan kehidupan pedesaan ke arah yang lebih maju. Akibat-akibat pembangunan tersebut, antara lain dapat dilihat isolasi desa sudah terbuka dengan pembangunan jalanan desa yang menghubungkan antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya. Komunikasi antara satu tempat lain yang relatif lancar. Kondisi ini memperbesar proses peniruan dari tempat lain dalam menerapkan teknologi baru. Kebiasaan-kebiasaan lama sebagian sudah ditinggalkan, seperti kebiasaan menghabiskan waktunya yang sia-sia sebagaimana dahulu tanpa kerja, sekarang sudah dimanfaatkan. Kebiasaan mempercayai pemali-pemali yang berhubungan dengan padi sudah ditinggalkan. Kebiasaan memanen dengan anai-anai diganti dengan memanen bersama sabit, akibat perubahan atau penggunaan bibit unggul.

Swadaya masyarakat mulai berkembang secara positif. Dinamika masyarakat, khususnya petani atau keluarga petani cenderung meningkat serta mengarah kepada usaha-usaha yang produktif. Demikian pula makna hidup berkelompok sebagai petani dirasakan manfaatnya, terutama dalam mengatur penggunaan irigasi, pembelian pupuk dan pestisida, dan penanaman secara serempak. Tiga macam kebutuhan terasa yang tersebut di atas paling mempengaruhi mutu kehidupan anggota masyarakat, ialah pembuatan jalanan desa, pembangunan sekolah-sekolah dan pendirian sarana kesehatan. Kemudian menyusul mesjid dan pengairan. Dalam kata lain, pengaruh proyek-proyek tersebut, bukan saja menyentuh sistem sosial mereka, melainkan menyangkut sistem budayanya.

B. TUJUAN PENULISAN

Perubahan pada bidang ekonomi, bukan saja berpengaruh pada perubahan bidang ekonomi itu sendiri, melainkan menyangkut aspek-aspek kehidupan lain, yaitu pada bidang sosial, politik dan kebudayaan. Demikian luasnya pengaruh Pelita itu atau pembaharuan akibat Pelita, maka dalam tulisan ini dibatasi hanya bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh itu pada bidang pemerintahan desa yang meliputi:

1. Struktur pemerintahan
2. Cara pemilihan dan peranan pimpinan dan aparat pemerintah desa
3. Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non-pemerintah
4. Keadaan organisasi politik dan non-politik.

Masalah pemerintahan di pedesaan merupakan salah satu aspek dari kehidupan kebudayaan yang dihubungkan dengan Pelita Nasional. Pengungkapan aspek pemerintahan di desa sangat penting artinya, terutama kehidupan masyarakat desa. Tantangan perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran tentang pengaruh yang berkaitan dengan pengaruh kehidupan masyarakat desa. Tantangan perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran tentang pengaruh yang berkaitan dengan pengaruh kehidupan masyarakat pedesaan belum didokumentasikan sepenuhnya, oleh karena itu karya ini memusatkan perhatiannya pada aspek Sejarah pengaruh Pelita di daerah, khususnya di pedesaan. Meskipun berbagai hal akan tercakup dalam tulisan nanti, namun semuanya itu merupakan rangkaian yang saling berkait satu sama lain dalam kerangka kehidupan yang dianggap erat kaitannya dengan sistem pemerintahan desa.

Pengaruh Pelita pada struktur pemerintahan, mungkin kedengarannya agak aneh, akan tetapi keanehan itu akan hilang bilamana kita kembali mengingat struktur pemerintahan yang bersifat raja-raja dan warisan itu masih dibawa dalam alam kemerdekaan. Pelita Nasional mengajak adanya kesatuan dan sifat kedaerahan diangkat menjadi sifat nasional, maka struktur pemerintahan adalah pertama-tama kena pengaruh, oleh karena merupakan cerminan dan memberi pola terhadap sikap dan tingkah laku anggota masyarakat.

Sebagaimana halnya di Sulawesi Selatan dahulu, pemerintahan tersusun sebagai lembaga-lembaga gabungan dari beberapa kesatuan adat, ataupun di mana masih dilanjutkan kebiasaan rapat besar (*anggota hudat*) yang dalam susunannya duduk pula wakil-wakil dari golongan-golongan rakyat sebagai tanda demokrasi kesultanan, maka melalui saluran itu unsur-unsur kerakyatan dapat mempertahankan diri dalam susunan pemerintahan pusat kesultanan. Adanya Pelita, struktur pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan atau sekurang-kurangnya mengalami penyederhanaan sedemikian rupa menurut keperluan praktis.

Tema kedua dari tujuan penulisan ini, ialah untuk melihat perubahan sistem pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa, sampai di mana pengaruh Pelita dalam mengubah sistem itu. Apabila kita menengok pada masa lampau, bahwa setiap adanya perubahan kekuasaan dalam pemerintahan, ikut pula berubah cara-cara pemilihan pimpinan *wanua* atau desa, oleh karena adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan struktur pemerintahan yang sedang berlaku, ditambah dengan kepentingan-kepentingan tertentu oleh penguasa, terutama guna pemungutan pajak, maka sistem pemilihan kepala desa oleh rakyat dari rolongan adat diganti dengan sistem pengangkatan. Demikian ini berlaku pula zaman sekarang sebagai usaha sosialisasi sistem pemilihan menurut Pancasila dan UUD-45 melalui Pelita Nasional.

Tema ketiga sebagai tujuan penulisan ini, adalah mempersoalkan kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non-pemerintah. Sebagaimana diketahui, bahwa dahulu yang menjadi tokoh masyarakat atau pemuka non-formal adalah pemuka adat dan pemuka agama. Pengaruh Pelita terhadap siapa yang dianggap tokoh dan pemuka masyarakat menurut aspirasi anggota masyarakat, sekarang ini tampaknya sudah bergeser. Memang di berbagai posisi sosial, pemuka adat dan agama masih diakui eksistensinya, tetapi peran pemuka adat dan agama masih diakui eksistensinya, tetapi peran yang dimainkannya sudah berkarat. Dewasa ini muncul aspirasi baru dari anggota masyarakat, bahwa selain pemuka adat dan agama, lebih utama harus dipandang adalah mereka yang memiliki kemampuan ilmu dan keterampilan, ditambah keikhlasan untuk mengabdikan. Faktor kebangsawanan dan keulamaan sebagai pemimpin non-pemerintah sebagiannya sudah bergeser kepada fungsi-fungsi tertentu menurut bidang yang diperlukan untuk itu dalam pembagian wewenang kemasyarakatan.

Tema keempat yang dipersoalkan dalam tulisan ini adalah keadaan organisasi politik dan non-politik. Akibat pengaruh Pelita yang menginginkan adanya kesatuan dan persatuan dalam membangun pedesaan, berbagai cara yang dilakukan agar gerakan-gerakan politik ditekan sedemikian rupa sepanjang tidak mengganggu jalannya pembangunan, oleh karena itu kehidupan organisasi politik sebagiannya diarahkan dan sebagiannya lagi ditiadakan, jika dianggap tidak sesuai dengan iklim pembangunan. Tanggapan-tanggapan mengenai hal ini amat peka, terdapat di antara kritikus sosial melemparkan kata-kata,

bahwa organisasi politik di pedesaan dibunuh secara semena-mena. Pada kesempatan ini, hanya dikatakan, bahwa organisasi-organisasi sebaiknya ditumbuhkan dari kalangan masyarakat sesuai dengan tuntutan anggota masyarakat.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN NASKAH

Dalam kepustakaan Ilmu Sejarah, disebutkan bahwa penelitian Sejarah senantiasa dimulai dengan kegiatan studi pustaka, yaitu penggunaan sumber-sumber sejarah sebagai bahan penelitian. Sumber-sumber sejarah tersebut meliputi bahan-bahan sebagai berikut:

1. Buku-buku sejarah yang berhubungan dengan sejarah daerah Sulawesi Selatan.
2. Brosur-brosur yang diterbitkan oleh berbagai kalangan, seperti organisasi-organisasi, militer dan jawatan penerangan.
3. Surat-surat kabar, baik terbitan mingguan maupun terbitan harian. Selain penelitian kepustakaan, dilengkapi pula dengan penelitian seperti benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat pada Museum Negeri Lagaligo. Demikian pula penelitian terhadap bangunan-bangunan bersejarah di daerah-daerah.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik.

1. Observasi Partisipasi

Teknik penelitian ini merupakan pengamatan langsung kepada desa-desa yang menjadi lokasi sampel. Diamati semua hasil pembangunan, baik yang berupa bangunan gedung, jalanan, pengairan maupun berupa sarana produksi pertanian. Kemudian dari pengamatan ini diadakan pencatatan (*recording*) dan catatan harian. Obyek-obyek yang dicatat meliputi tingkah laku penduduk desa yang berhubungan dengan hasil-hasil pembangunan. Dengan kata lain, tingkah laku anggota masyarakat dalam berhubungan atau dalam memakai, atau menggunakan hasil pembangunan tersebut. Suatu asumsi, bahwa tingkah laku manusia itu berubah sesuai dengan tata-ruang dan lingkungannya. Hasil-hasil pembangunan, adalah memberikan kepada penduduk tata-ruang dan lingkungan tertentu yang berbeda dengan lingkungannya yang lama. Dengan demikian sentuhan hasil pembangunan akan membawa perubahan tingkah laku dan selanjutnya akan membawa perubahan sikap mental secara berangsur. Semua tingkah laku dan perubahannya

direkam sedemikian rupa untuk mendapatkan bagaimana pengaruh pembangunan itu di pedesaan.

2. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara diadakan oleh peneliti kepada informan kunci dan informan ahli. Informan kunci terdiri dari Kepala desa dan aparatnya, termasuk pula bekas kepala desa, terutama mereka yang pernah menjabat kepala desa pada tahun 1950 – 1965. Informan ahli, adalah para pemuka masyarakat, ahli adat seperti *Tominan* di Tana Toraja, ahli lontara di tanah Bugis. Wawancara itu terutama diarahkan pada aspirasi anggota masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, apa yang dirasakan manfaatnya oleh anggota masyarakat, kemudian skala prioritas yang menjadi kebutuhan terasa. Kegunaan apa yang diperoleh dengan kegiatan pembangunan itu oleh pemerintah. Bagaimana bentuk partisipasi penduduk dan bagaimana swadaya penduduk dalam membangun desanya. Wawancara kepada bekas kepala desa diarahkan pada pertanyaan yang menyangkut masalah sebelum Pelita yang dialaminya, termasuk struktur pemerintahan dan cara-cara memilih kepala desa.

Menyadari akan kelemahan teknik-teknik penelitian tersebut, maka teknik lain digunakan sebagai pembantu adalah pengambilan foto-foto bangunan atau peninggalan bersejarah di daerah. Selain teknik bantuan itu, digunakan pula *tape-recorder* untuk membantu pencatatan secara cepat.

Dalam penelitian, memang di berbagai hal dialami banyak hambatan. Sebagian hambatan itu datang dari peneliti sendiri, bilamana telah mengalami kelelahan fisik akibat perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Hambatan pula datang dari penggunaan alat-alat bantu teknik penelitian, seperti ketidak-mahiran menggunakan tustel dan *tape-recorder*. Selain itu, hambatan utama yang dihadapi adalah informan yang masih hidup sudah mulai langka, sebagiannya pula mereka sudah melupakannya.

Apabila keadaan sebelum Pelita itu, memang terdapat banyak catatan di Kantor Statistik, mungkin akan memberi bantuan. Sebagaimana diketahui, bahwa Sulawesi Selatan pada tahun 1950 – 1965 itu, masih dalam keadaan kekacauan DI/TII yang disusul dengan kesenjangan sosial akibat G-30 S. Akibat dari hambatan itu, mungkin dapat dikatakan mengenai data sebelum Pelita itu agak kurang.

B A B II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

A. KEADAAN LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK.

Dalam rangka kompleks masalah tentang "Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan" maka ditetapkan sembilan buah desa sampel, sebagai lokasi penelitian, yakni :

Desa Pangli Palawa;
Desa Sesean Suloara;
Desa Sadan Matallo;
Desa Sompe;
Desa Anabanua;
Desa Tancung;
Desa Gattareng;
Desa Dampang; dan
Desa Matekko.

Dari seluruh desa sampel seperti tercantum di atas, maka tiga buah desa di antaranya terletak di daerah pegunungan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja; tiga buah terletak di daerah pedalaman Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo; dan tiga buah yang lainnya berada di daerah pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. Untuk mengetahui secara jelas mengenai letak masing-masing kabupaten sampel tersebut, dapat dilihat dalam Peta No. 1, sedangkan keadaan masing-masing desa sampel sebelum Pelita (periode tahun 1950 - 1965) akan diuraikan secara berturut-turut di bawah ini.

1. Keadaan Lingkungan Alam.

a. Desa Pangli Palawa

Secara administratif, desa Pangli Palawa termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Lokasinya terletak 7 Km di bahagian utara kota Rantepao, dengan batas-batas :

Desa Sadan Malimbong di bagian Utara;
 Desa Palangi di bagian Timur;
 Desa Bori Parinding di bagian Barat; dan
 Kecamatan Rantepao di bagian Utara.

Letak desa ini secara jelas dapat dilihat dalam peta No. 2.

Desa ini pada mulanya hanya merupakan sebuah kampung yang selama periode tahun 1949 – 1962 bernama Pangli, terdiri atas dua Rukun Kampung, yaitu Palangi dan Palawa. Kampung Pangli ini kemudian berubah namanya menjadi Palawa pada tahun 1963 berdasarkan atas hasil pertemuan dan kesepakatan para pemuka masyarakat di tempat itu. Akhirnya pada tahun 1966, kampung ini berubah pula namanya menjadi Pangli Palawa, sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja No. 46/SP/66, tanggal 29 Maret 1966. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1969 kampung Pangli Palawa sebagai suatu Unit pemerintahan terendah, berubah menjadi *Lembang* (artinya kurang lebih sama dengan istilah kampung), untuk kemudian berubah lagi menjadi "Desa", sejak tahun 1970 sampai sekarang.

Luas desa Pangli Palawa seluruhnya meliputi 1.429 Ha yang terdiri atas :

Tanah persawahan seluas	222	Ha.
Tanah ladang seluas	650,5	Ha.
T e g a l a n	116	Ha.
Pekarangan dan Perumahan	138,5	Ha.
Tanah kritis	315	Ha.
J u m l a h	1.425,0	Ha.

Sementara itu hasil penelitian menunjukkan, bahwa di seluruh wilayah Desa Pangli Palawa ditemukan jenis tanah Potsolid coklat kekuningan, semacam tanah Alluvial kelabu yang bahan induknya terdiri atas Batuan Bakumasam, sedangkan topografinya adalah 15% datar 33% berbukit, dan 52% bergunung.¹⁾

Data seperti tertera di atas ini menunjukkan, bahwa permukaan tanah di Desa Pangli Palawa kebanyakan merupakan tanah pegunungan, sehingga tidak memungkinkan diadakannya ekstensifikasi tanah persawahan. Hal ini tampak pula dalam tata guna tanah di mana bidang perladangan mendominasi areal terbesar dari penggunaan wilayah desa.

b. Desa Sesean Suloara

Desa ini terletak di daerah pegunungan dengan jarak 22 Km sebelah Barat Kota Rantepao atau 15 Km dari ibu kota Kecamatan Sesean. Letak desa ini kalau diukur dari ibu kota kabupaten (Makale), maka jaraknya akan mencapai 40 Km, dengan ketinggian 1.300 m dari permukaan laut. Adapun batas-batasnya, ialah :

Desa Taba di sebelah Utara;
Desa Tikala di sebelah Selatan;
Desa Sesean Natallo di sebelah Timur; dan
Desa Kepala Pitu di sebelah Barat.

Prasarana jalan ke desa ini dibuat sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, sedangkan keadaannya adalah demikian rusak, sehingga pada waktu musim hujan jalan tersebut hanya dapat dilalui dengan truk, itu pun biasanya menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk sampai ke pusat pemerintahan desa.

Luas desa ini seluruhnya meliputi areal 8.098 Ha, terdiri atas :

Tanah persawahan seluas	1.540 Ha.
Tanah ladang seluas	3.020 Ha.
T e g a l a n	307 Ha.
Tanah pekarangan seluas	277 Ha.
Hutan seluas	1.062 Ha.
Tanah kritis seluas	1.892 Ha.
<hr/>	
J u m l a h	8.098 Ha.

Sesuai dengan data seperti tercantum di atas, maka tanah perladangan merupakan bagian terbesar dari penggunaan tanah di Desa Sesean Suloara. Hal ini dimungkinkan adanya, karena keadaan-keadaan permukaan buminya yang sebagian besar bergunung-gunung. Sementara itu penggunaan tanah pekarangan amat sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan lain-lainnya, hal mana berarti bahwa di desa tersebut masih sangat jarang penduduknya di masa yang lampau (sebelum Pelita).

Adapun keadaan tanahnya merupakan tanah pegunungan dan berbatu-batu yang banyak ditumbuhi hutan-hutan bambu, sementara yang lainnya dijadikan persawahan, perkebunan kopi, cengkeh dan

lain-lainnya. Batu-batuan yang terdapat di tempat itu, oleh penduduk banyak dijadikan penguburan orang mati yang sampai sekarang banyak di antara kuburan-kuburan asli yang dijadikan obyek wisata bagi para turis asing maupun domestik.

Jenis tanah yang diketemukan di daerah ini, ialah Potsolid coklat kelabu semacam tanah alluvial kelabu yang bahan induknya berupa batuan bakumasam, sedangkan topografinya adalah 5% datar, 35% berbukit, dan 60% bergunung.

c. Desa Sadan Matallo

Nama desa ini disesuaikan dengan letaknya yang berada di bagian Timur Kecamatan Sesean, hal mana merupakan tempat terbitnya matahari di waktu pagi. Kata matahari dikenal dalam bahasa daerah Tana Toraja, sebagai *mata allo*. Demikian, Sadan Matallo berarti Sadan tempat matahari biasanya.

Desa Sadan Matallo terletak di daerah pegunungan dengan jarak 15 Km sebelah Utara Kota Rantepao atau dengan jarak 7 Km di bagian Timur ibu kota Kecamatan Sesean. Desa ini berbatasan dengan :

Kabupaten Luwu di sebelah Utara dan Timur;

Desa Balusu di sebelah Selatan;

Desa Sadan Malimbong di sebelah Barat.

Pada masa yang lampau, sebelum dimulai Pelita I prasarana jalan ke desa ini sangat buruk dan sukar dilalui, meskipun dengan mempergunakan kendaraan truk. Sekarang, keadaan jalan tersebut sudah cukup baik, sehingga mudah dijangkau dengan mempergunakan kendaraan umum, oplet, truk dan sebagainya.

Sadan Matallo itu tanahnya bergunung-gunung di bagian besarnya dan berbatu-batu, sedangkan sebagian yang lainnya ditumbuhi hutan-hutan bambu, persawahan, kebun kopi, dan lain sebagainya.

Luas Desa Dadan Matallo seluruhnya meliputi areal 5.880,25 Ha, terdiri atas :

Tanah persawahan seluas	173	Ha.
Tanah ladang	684	Ha.
T e g a l a n seluas	275	Ha.
Tanah pekarangan seluas	2.375,25	Ha.
Hutan seluas	353	Ha.
Tanah kritis seluas	2.020	Ha.
<hr/>		
J u m l a h	5.880,25	Ha.

Tampak dengan jelas, bahwa penggunaan tanah di desa Sadan Matallo sebagian besar dipergunakan untuk pekarangan, disusul dengan tanah kritis, sedangkan selebihnya secara berturut-turut adalah digunakan untuk perladangan, hutan, tegalan dan persawahan. Data ini menunjukkan pula, ahwa tanah untuk keperluan persawahan hanya seluas 173 Ha dari seluruh luas desa. Hal itu disebabkan oleh karena keadaan permukaan bumi dan jenis tanahnya yang bergunung-gunung serta banyak berbatu-batu.

Mengenai jenis tanah di Desa Sadan Matallo diketemukan Pot-solid coklat kekuning-kuningan semacam alluvial kelabu yang bahan induknya dari batuan Bakumasam, dengantopografi 10% datar, 32% berbukit, dan 58% bergunung.

Adapun curah hujan di ketiga desa yang dikemukakan di atas tadi, dapat diperinci sebagai berikut :

TABEL I. CURAH HUJAN RATA-RATA DALAM SETAHUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TATOR.

No.	Nama Bulan	Jumlah Hari	Ukuran	(mm)	Keterangan
1.	Januari	15	236	mm	
2.	Pebruari	19	405	mm	
3.	Maret	28	817	mm	
4.	April	20	737	mm	
5.	Mei	21	740	mm	
6.	Juni	15	347	mm	
7.	Juli	20	520	mm	
8.	Agustus	3	320	mm	
9.	September	16	551	mm	
10.	Oktober	18	253	mm	
11.	Nopember	—	—		
12.	Desember	—	—		

Sumber : Catatan di Kantor Kecamatan Sesean.

Dari data yang tercantum di atas, tampak bahwa hujan selalu turun selama 10 bulan, yaitu dari bulan Januari s.d. bulan Oktober. Dalam hal ini, hujan lebih banyak turun dalam bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli, sedangkan pada bulan Nopember dan Desember, biasanya tidak ada hujan.

d. Desa Sompe

Desa ini merupakan salah satu unit pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Sabbang Paru Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Letak lokasinya berada pada jalan Propinsi poros Soppeng Wajo dengan jarak 14 Km dari ibu kota kabupaten (Sengkang). Adapun batasnya, ialah :

Desa Wage di sebelah Utara;
 Kecamatan Pammana di sebelah Timur;
 Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan; dan
 Desa Ugi di sebelah Barat.

Sesuai dengan letaknya yang berada di pinggir jalan propinsi, maka desa ini secara mudah dapat dijangkau, baik dengan kendaraan beroda empat maupun kendaraan beroda dua. Namun demikian, sarana transportasi yang banyak dipergunakan oleh penduduk setempat pada periode tahun 1950 – 1965 adalah dokar yang dikenal sebagai *bindi* (bhs. Bugis). Hal itu disebabkan oleh karena arus lalu lintas pada masa itu belum terlalu pesat, sebagaimana keadaannya dewasa ini, di samping keadaan keamanan ketika itu tidak stabil akibat gangguan yang ditimbulkan oleh kaum pengacau dan gerombolan DI/TII.

Sekarang, setelah berlangsungnya Pelita hubungan lalu lintas dari dan ke Desa Sompe dengan mempergunakan segala jenis kendaraan sudah lancar, malahan tampaknya volume penggunaan dokar dan sepeda sebagai alat transpor sudah sangat menurun.

Luas desa seluruhnya meliputi areal 2.474,69 Ha. dengan penggunaan sebagai berikut :

Tanah persawahan seluas	837,15 Ha.
Tanah ladang seluas	1.488,99 Ha.
Tanah pekarangan	114,63 Ha.
Tanah padang pengangonan seluas	3,7 Ha.
Tanah kering lainnya seluas	30,22 Ha.
J u m l a h	2.474,69 Ha.

Dari luas seluruh desa ternyata bahagian terbesarnya dipergunakan untuk tanah perladangan dan persawahan, sedangkan kegunaan lainnya yang menonjol adalah untuk tanah pekarangan. Adapun bagian terkecil dari keseluruhan luas desa, dipergunakan untuk tanah pengangonan.

Jenis tanah di desa ini rata-rata Alluvial coklat kemerah-merahan, Mediteran coklat, Grumosol serta Latosol. Sedangkan topografinya adalah 75% datar, 15% bergelombang, dan 10% rawa.

Sesuai dengan keadaan topografinya, Desa Sompe termasuk salah satu daerah agraris, baik berupa tanah kering maupun tanah basah.

e. Desa Anabanua.

Secara administratif Desa Anabanua termasuk salah satu unit pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Lokasinya terletak di dekat perbatasan antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang atau sekitar 20 Km dari kota Sengkang. Kalau dilihat dari sudut geografis, maka desa ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan propinsi dan persimpangan jalan antara poros Wajo – Sidenreng Rappang; dan poros Wajo – Luwu.

Adapun jenis tanah yang terdapat di desa ini ialah jenis tanah Alluvial coklat kemerah-merahan, Mediteran coklat, Grumosol dan Latosol. Sedangkan topografinya adalah 75% datar, 15% bergelombang, 10% rawa.

Keadaan topografinya yang kebanyakan datar menyebabkan di Desa Anabanua terdapat tanah-tanah pertanian yang cukup subur. Sementara letaknya yang sangat strategis menyebabkan desa ini sejak dahulu selalu ramai dan banyak penghuninya.

f. Desa Tancung.

Sebagaimana halnya Desa Sompe dan Anabanua, Desa Tancung ini pun termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, tepatnya di wilayah Kecamatan Tanasitolo. Letak lokasinya berada pada Km 7 dari kota Sengkang. Apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Dati II Wajo, maka Desa Tancung termasuk paling lancar hubungannya di samping karena terletak di perbatasan ibu kota kabupaten, juga berada pada pinggir jalan propinsi poros Wajo – Sidenreng

Rappang, sehingga memungkinkan penduduk untuk lebih mudah bepergian baik ke ibu kota kabupaten maupun ke ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, demikian pula ke tempat-tempat lainnya.

Lokasi desa ini berbatasan dengan :

Desa Anabanua di bagian Utara;
Mengo di bagian Barat;
Sengkang di bagian Selatan; dan
Paria di bagian Timurnya.

Jenis-jenis tanah yang terdapat di seluruh wilayah desa, ialah tanah Alluvial coklat kemerah-merahan, Mediteran coklat, Grumusol serta Latosol sedangkan topografinya adalah rata-rata 75% datar, 15% bergelombang dan 10% rawa.

Tampak dengan jelas, bahwa ketiga buah desa yang disebutkan terakhir, adalah berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Agar lebih jelasnya mengenai letak ketiga desa tersebut, dapat dilihat dalam peta no. 3.

g. Desa Gattareng.

Desa Gattareng merupakan salah satu unit pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Gangking Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. Lokasinya terletak pada ujung bagian Barat Kecamatan Gangking dengan batas-batas wilayahnya, sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng;
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa M. Bacinna;
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Dampang; dan
Sebelah Utaranya berbatas dengan Desa Borong Rappoa.

Desa ini letaknya pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut, sedangkan jaraknya dari pantai berkisar 20 Km. Prasarana jalan di desa ini cukup memadai, sehingga memungkinkan lancarnya perhubungan penduduk, baik ke ibu kota kecamatan maupun ibu kota kabupaten, bahkan demikian pula ke ibu kota propinsi.

Luas seluruh Desa Gattareng meliputi areal 34 Km persegi, terdiri atas tanah persawahan, perkebunan hutan, pekarangan, sungai, lembah dan bukit-bukit. Tanah di Desa Gattareng cukup untuk

sawah dan perkebunan, karena dilalui oleh aliran Sungai Bialo yang memungkinkan pemanfaatannya untuk kepentingan irigasi.

Mengenai topografi dan jenis tanah di desa ini adalah 10% bergunung, 70% datar dan 20% berbukit, terdiri atas jenis-jenis tanah Mediteran coklat kemerahan, Rogosol dan Latosol. Musim hujan di desa ini menunjukkan situasi naik turun, rata-rata Ch. 1.500 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah batas musim yang dipengaruhi secara berlawanan pantai Timur dan pantai Barat Sulawesi Selatan. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan-bulan Januari, April, Mei, Juni dan Juli, sedangkan musim kemaraunya jatuh pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember setiap tahun.

h. Desa Dampang.

Sebagaimana halnya dengan Desa Gattareng, Desa Dampang termasuk pula salah satu unit pemerintahan desa dalam wilayah pemerintahan kecamatan Gangking Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. Letak desa ini berada pada bahagian tengah kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Desa Gattareng;

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bialo;

Sebelah Timur berbatas dengan Desa B. Nyeleng; dan

Sebelah Utaranya berbatas dengan Desa Mattirowalie.

Desa ini sebelum ada Pelita telah mempunyai jalan daerah yang menghubungkan dengan jalan raya poros Bulukumba — Ujung Pandang maupun kepada jalan-jalan daerah lainnya yang melintang antara Desa Bontosunggu Desa Nyeleng, akan tetapi pada periode sebelum tahun 1950 — 1965 jalan-jalan daerah tersebut jarang berfungsi, karena para penduduk sedang tercekam oleh kerawanan-kerawanan, akibat mengganasnya pengacau DI/TII.

Letak desa ini dari pantai berkisar 20 Km, sedangkan tingginya dari permukaan laut adalah 200 m. Keadaan perumahan terpecah-pecah pada kelompok-kelompok perkampungan yang di antaranya terdapat hutan belukar, bukit, lembah dan sungai. Antara kampung yang satu dengan kampung lainnya dihubungkan dengan jalan yang penuh dengan semak di kiri kanannya. Jalanan daerah yang telah ada sengaja diperintahkan oleh gerombolan DI/TII untuk tidak ditempati

pinggirnya sebagai tempat mendirikan rumah, karena sewaktu-waktu dapat dicapai oleh tentara TNI. Di tengah-tengah Desa Dampang mengalir sebuah sungai (sungai Bialo) yang cukup baik untuk pengairan (irigasi) dan di sekitarnya terdapat tanah persawahan yang cukup luas. Di sini masih terdapat hutan pohon kemiri, asam dan pohon-pohon lainnya, serta bukit dan lembah. Penggarapan tanah-tanah yang cukup baik untuk pertanian belum intensif, sebab adanya gangguan gerombolan DI/TII.

Topografis dan jenis tanah di desa tersebut, adalah Mediteran coklat kemerahan, 90% berbukit dan 10% bergunung, Ragsol dan Latosol 70% datar dan 30% berbukit/bergunung.

Musim hujan pada umumnya terjadi bulan-bulan Januari sampai dengan Juli dan bulan-bulan kering jatuh pada bulan Agustus s.d. Desember.

i. Desa Matekko.

Desa Matekko terletak pada ujung sebelah Selatan Kecamatan Gangking, berbatasan dengan kabupaten Bantaeng di bagian Barat, laut Flores di bagian Selatan, kecamatan Ujung Bulu di bagian Timur dan Desa B. Macinna di bagian Utara.

Letak desa ini berada di pinggir laut, menyebabkan banyak di antara penduduknya yang bermata pencaharian hidup sebagai nelayan. Desa Matekko sebelum Pelita terdiri atas empat kampung, yaitu :

- 1) Kampung Ponre.
- 2) Kampung Sapiri.
- 3) Kampung Panyatana.
- 4) Kampung Kalamessang.

Keempat kampung di atas ini mempunyai lingkungan alam yang hampir sama, yaitu terdiri dari pantai dan tanah yang baik untuk tanah persawahan dan perkebunan. Keadaan kampung (kelompok perumahan) pada saat sebelum Pelita kebanyakan terpusat pada pusat-pusat keempat perkampungan nelayan. Keadaan perumahan tidak teratur, karena tidak diatur oleh pemerintah. Di kampung Panyatana dan Kalamessang terdapat padang rumput yang cukup luas yang pada zaman Jepang pernah dibuat lapangan terbang dan sebahagian dijadikan tempat perkebunan kapuk dan pemeliharaan sapi oleh suatu perusahaan Swiss. Di sepanjang pantai, pada tempat-tempat tertentu terdapat rawa-rawa yang baik sekali

untuk dijadikan empang (tambak). Pada tempat-tempat tertentu pula masih didapati hutan belukar tempat hidup rusa menjangan.

Topografi dan jenis tanah di desa Matekko adalah Mediteran coklat kemerahan 90% berbukit dan 10% bergunung, Regosol dan Latosol 70% datar dan 30% berbukit. Musim hujan pada umumnya terjadi bulan-bulan Januari sampai dengan Juli dan bulan-bulan kering jatuh pada bulan Agustus sampai dengan Desember.

2. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa-desa sampel sebelum Pelita adalah :

- a. Desa Pangli Palawa 3.160 jiwa.
- b. Desa Sesean Suloara 3.978 jiwa.
- c. Desa Sadan Matallo 2.854 jiwa.
- d. Desa Sompe 9.443 jiwa.
- e. Desa Anabanua 15.934 jiwa.
- f. Desa Tancung 31.950 jiwa.
- g. Desa Gattareng 6.118 jiwa.
- h. Desa Dampang 6.315 jiwa.
- i. Desa Matekko 5.857 jiwa.

Perincian jumlah dan jenis kelamin penduduk tersebut di atas ini adalah :

TABEL II. JUMLAH DAN JENIS KELAMIN PENDUDUK DI DESA-DESA SAMPEL PADA TAHUN 1965.

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total
		Lk (jiwa)	Pr (jiwa)	
1.	Pangli Palawa	1.503	1.657	3.160
2.	Sesean Suloara	1.934	2.044	3.978
3.	Sadan Matallo	1.401	1.453	2.854
4.	S o m p e	4.366	5.077	9.443
5.	Anabanua	7.924	8.010	15.934
6.	Tancung	14.990	16.960	31.950
7.	Gattareng	2.795	3.323	6.118
8.	Dampang	2.905	3.410	6.315
9.	Matekko	2.907	2.950	5.857
Jumlah		40.725	44.884	85.609

- Sumber :
1. Kantor Statistik Dati II Tator
 2. Kantor Statistik Kabupaten Wajo
 3. Kantor Statistik Kabupaten Bulukumba

Data tercantum di atas ini menunjukkan bahwa dari seluruh desa sampel, desa-desa dalam kabupaten Wajo merupakan jumlah terbanyak penduduknya, ini jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hal tersebut disebabkan karena daerah Wajo pada periode tahun 1957 – 1965 merupakan tempat pengungsian bagi penduduk sekitarnya, sedangkan desa-desa di Tator dan Bulukumba adalah daerah rawan akibat rongrongan pengacau DI/TII.

B. KEADAAN PENDIDIKAN

1. Pangli Palawa.

Di desa ini pada tahun 1950 – 1965 atau sebelum Pelita keadaan pendidikannya sangat rendah, hal ini terutama disebabkan sarana pendidikannya sangat minimum yaitu hanya SD, yang didirikan tahun 1940 oleh Yayasan Pendidikan Kristen Tana Toraja, letak sekolah tersebut di Desa Palangi yang jaraknya dari Kampung Palawa 1 km lebih dan harus menyeberangi sungai di mana prasarana jembatannya tidak ada. Bila musim hujan sungainya banjir yang tak mungkin anak-anak untuk menyeberanginya. Tahun 1963 barulah berhasil dibangun SD Negeri Palawa dan dengan demikian anak usia sekolah dari desa ini dapat tertampung semuanya.

2. Sesean Suloara.

Sejak tahun 1915 di Desa Suloara telah didirikan Sekolah Dasar yang pada saat itu dinamakan Sekolah Rakyat yang mendirikan dan mengelola sekolah tersebut adalah YPKT sekolah tersebut didirikan di Kampung Toyasa. Kemudian berturut-turut didirikan lagi tiga SR yaitu di Tondok Lita tahun 1946 dan di Batu Kambang tahun 1957 dan pada tahun 1961 di Kayu Rame yang semuanya didirikan dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Tana Toraja (YPKT). Kemudian SD Kayu Rame mendapat subsidi dari YPKT yang menyiapkan/membantu tenaga guru. Pada tahun 1957 didirikan lagi SD Sesean yang pada tahun 1963 SD Sesean ini hilang dilebur jadi SD Batutumonga. Selanjutnya pada tahun 1976 SD Tondok Lita digabung dengan SD Toyasotiu dan menjadi SD Negeri yang dengan demikian YPKT hanya membantu tenaga guru, alasan penggabungan itu karena tahun 1975 di Tondok Lita

didirikan SD Inpres. Kemudian di Tondok Lita didirikan SMP Swasta di mana YPKT menyiapkan tenaga guru, gaji guru dibayar oleh swadaya masyarakat. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang berbentuk sarana gedung yang cukup memadai ini maka anak usia sekolah dari desa ini dapat terserap semuanya sehingga pemerataan kesempatan belajar telah tercapai di desa ini jadi masalah pendidikan tidak ada masalahnya mulai dari dulu hingga saat ini.

3. **Sadan Matallo**

Sejak zaman Belanda di desa ini telah ada sekolah dasar yang pada saat itu dinamakan sekolah rakyat, sekolah ini didirikan dan dikelola oleh zending. Kemudian berturut-turut tahun 1953 dibangun SD Sadan II Negeri kemudian tahun 1958 dibangun SD Sadan III Negeri, selanjutnya tahun 1960 oleh YPKT didirikan lagi SD Sadan Matallo yang pada tahun 1976 dinegerikan hingga sekarang. Dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai itu maka anak-anak usia sekolah yang ada di Desa Sadan Matallo ini dapat terserap seluruhnya. Dan dengan terserapnya anak usia sekolah tersebut berarti pemerataan kesempatan belajar telah dicapai di desa ini. Yang menjadi masalah di desa ini belum adanya SLTP dan SLTA.

4. **S o m p e .**

a. **Pemerintah.**

Jumlah SD yang didirikan sebelum Pelita di Desa Sompe sebanyak empat buah. Sedang jumlah murid yang tertampung saat itu belum mencapai daya tampung yang maksimal, karena penduduk seluruhnya belum menyadari tentang manfaat dan kebaikan pendidikan. Bahkan mereka pada waktu itu berpendapat bahwa lebih banyak manfaatnya jika anak-anak mereka diterjunkan di bidang pertanian atau menggembala ternak, sehingga pada waktu itu kebanyakan anak-anak yang telah mencapai usia sekolah (6 – 7 tahun) ke atas, oleh orang-orang tua mereka diusahakan mengajaknya untuk ikut membantu dalam pengelolaan tanah persawahan/perladangan sebagai pencaharian utama. Demikian, aspek pendidikan sebelum Pelita belum begitu berkembang dengan baik,

akibatnya banyak didapati warga masyarakat yang masih belum mengenal huruf.

b. Sekolah Swasta

Selama periode sebelum Pelita di desa Sompe terdapat satu buah sekolah yang berstatus Swasta dengan jumlah muridnya berkisar 37 orang. Jenis sekolah swasta tersebut adalah Ibtidaiyah, suatu sekolah agama tingkat dasar yang disebut pula Sekolah Dasar As'adiyah.

Adapun sistem belajar pada sekolah itu dilaksanakan pada waktu sore hari, sedangkan murid-muridnya kebanyakan bersekolah di waktu pagi hari pada sekolah-sekolah pemerintah yang ada.

5. Anabanua.

Keadaan pendidikan di Desa Anabanua sebelum Pelita, agaknya sudah jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan desa-desa sampel di Tana Toraja. Hal ini ternyata dari jumlah sekolah-sekolah yang ada, yakni berjumlah 13 buah sampai dengan akhir periode 1965, sedang jumlah murid-murid yang tertampung di sekolah-sekolah tersebut keseluruhannya berjumlah 3.182 orang.

Kenyataan tentang keadaan sekolah dan murid-murid di dalam periode sebelum Pelita seperti tercantum di atas, menunjukkan bahwa sejak dulu tingkat kesadaran masyarakat memang telah memadai, sehingga hampir setiap orang tua senantiasa berusaha untuk memberikan kesempatan kepada keturunan mereka untuk memperoleh pendidikan formal. Hal itu agaknya disebabkan oleh karena banyaknya pengaruh tentang pentingnya faktor pendidikan itu sendiri, yang mana disampaikan oleh sanak keluarga dan handai taulan yang telah kembali dari perantauan. Dengan kata lain dapat diduga, bahwa kemajuan pendidikan di desa tersebut antara lain dimungkinkan karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar.

Perlu dijelaskan, bahwa di Desa Anabanua tidak didapati sekolah-sekolah swasta. Ini disebabkan karena sekolah-sekolah pemerintah yang sudah ada telah sanggup menampung anak usia sekolah.

6. Tancung.

Sebelum Pelita (periode tahun 1950 – 1965) jumlah sekolah dasar yang ada sebanyak 15 buah. Adapun jumlah murid yang tertampung sampai akhir tahun 1965 ada sebanyak 3.809 orang. Secara sepintas lalu, dapat dikemukakan bahwa sejak periode sebelum Pelita masyarakat dalam Desa Tancung ini telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya arti dan fungsi bagi perkembangan anak-anak mereka.

Selain dari ke-15 sekolah yang disebutkan di atas masih terdapat pula satu buah sekolah swasta, dengan jumlah murid keseluruhannya 147 orang.

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi perkembangan bidang pendidikan di Desa Tancung, ialah karena sejak zaman yang lampau desa tersebut memang selalu terbuka dan banyak menerima kunjungan dari orang-orang luar. Dengan kata lain, penduduk desa banyak berhubungan dengan penduduk di luar desa sehingga bagaimana pun telah ada semacam perubahan pandangan khusus menyangkut bidang pendidikan.

7. Gattareng.

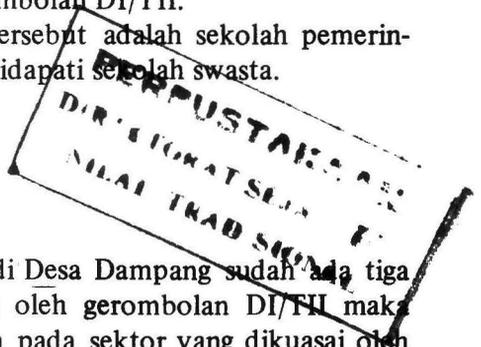
Dalam periode tahun 1950 – 1965 di Desa Gattareng, terdapat tiga buah sekolah dasar, dengan jumlah muridnya meliputi 374 orang pada akhir tahun 1965. Keadaan itu disebabkan antara lain karena banyak guru sekolah yang mengungsi ke kota akibat gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerombolan DI/TII.

Ketiga buah Sekolah Dasar tersebut adalah sekolah pemerintah, sedangkan di tempat itu tidak didapati sekolah swasta.

8. Dampang.

a. Pemerintah.

Pada periode sebelum Pelita di Desa Dampang sudah ada tiga buah SD, namun karena dikuasai oleh gerombolan DI/TII maka semua guru SD lari masuk ke kota pada sektor yang dikuasai oleh TNI. Supaya SD jalan terus, maka oleh gerombolan DI/TII ditempatkan guru pengganti dari orang-orang yang dapat membaca dan menulis, walaupun orang-orang tersebut bukan dari sekolah guru dengan gaji yang ala kadarnya.



Demikianlah pendidikan berjalan ala kadarnya pula hanya untuk memenuhi tuntutan keadaan yang berlaku pada waktu itu. Nanti pada akhir tahun 1962 pada saat gencatan senjata berlaku bagi DI/TII dengan TNI, barulah berangsur-angsur SD yang kehilangan guru diisi kembali.

Di samping itu kesadaran masyarakat tentang pendidikan mulai digarap kembali dengan penerangan, ceramah dan dakwah melalui mesjid-mesjid dan tempat-tempat pertemuan lainnya.

b. Swasta.

Pendidikan swasta yang ada pada saat sebelum Pelita adalah seolah Ibtidaiyah yang didirikan oleh gerombolan DI/TII, namun keadaannya kurang efektif sebab keadaannya adalah keadaan darurat. Hasil dari pendidikan swasta tersebut kurang memuaskan, karena guru-gurunya tidak berasal dari sekolah khusus Pendidikan Guru Agama yang berijazah.

9. Matekko.

a. Pemerintah.

Pendidikan yang dimiliki/dilaksanakan oleh pemerintah adalah SD sebanyak tiga buah. Jumlah murid tiap SD tersebut belum mencapai daya tampung yang maksimal, karena penduduk belum seluruhnya menyadari tentang kebaikan pendidikan. Selain SD tidak ada lagi sarana pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Swasta.

Sekolah swasta yang ada satu-satunya, ialah Ibtidaiyah yang di-asuh oleh Muhammadiyah.

C. STRUKTUR PEMERINTAHAN.

1. Pangli Palawa.

Pada tahun 1952 struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala kampung saja, Pemerintah desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang dalam bahasa daerahnya disebut *Pangarah*. Pangarah dapat disamakan dengan R.K. pada saat se-

karang ini. Selain itu kepala kampung mempunyai hak untuk mengangkat seorang juru tulis untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administrasi.

Kemudian pada tahun 1968 struktur pemerintahan desa kembali dari kepala kampung menjadi kepala lembang. Kepala Lembang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala-kepala lingkungan.

2. Sesean Suloara

Desa Suloara ini merupakan desa tua di Tana Toraja sejak zaman Belanda desa ini terdiri dari enam kampung :

- a. Kampung Toyasariu
- b. Kampung Sesean
- c. Kampung Pangden
- d. Kampung Buntu Tanduk
- e. Kampung Parandakanan
- f. Kampung Torea.

Karena kampung ini tergabung dalam satu pemerintahan, yaitu yang disebut *Buah* dan dikepalai oleh *Kepala Buah*. Kepala Buah ini jika dibandingkan dengan keadaan sekarang dapat disamakan dengan Camat, selanjutnya setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan keenam kampung tersebut bergabung menjadi satu, yaitu kampung Sesean Suloara yang dikepalai oleh seorang kepala kampung. Keenam kampung yang bergabung itu berubah menjadi sebagai berikut : Toyasariu, Sesean, Pangden, Tonga Riu, Limbong, dan Torea. Sedang kedua kampung, yaitu : Buntu Tondok dan Denan masuk ke kampung lain/desa lain.

Pada tahun 1968 kampung Suloara ini diubah namanya menjadi Lembang Sesean Suloara yang dikepalai oleh seorang *Kepala Lembang*. Kepala Lembang ini dibantu oleh kepala-kepala lingkungan dan seorang tata usaha.

3. Sadan Matallo.

Pada zaman penjajahan Desa Sadan Matallo terdiri dari tiga kampung, yaitu : Kampung Bobatu, Kampung Andulan, dan Kampung Banula. Masing-masing kampung tersebut dikepalai oleh seorang

kepala kampung. Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan ketiga kampung ini digabung menjadi satu kampung yang diberi nama Kampung Matallo, yang dikepalai oleh seorang Kepala Lembang. Kepala Lembang ini dibantu oleh kepala lingkungan dan seorang tata usaha.

4. Sompe .

Struktur Pemerintahan Desa (periode 1950 – 1965) dikenal dengan istilah *Distrik* (sekarang Kecamatan) yang mana Distrik tersebut terbagi atas tiga Distrik yaitu : Distrik Liu, Distrik Ugi, dan Distrik Wage.

Dari ketiga Distrik tersebut di atas membawahi beberapa kampung dan setiap kampung mempunyai kepala kampung masing-masing. Adapun bawahan-bawahannya adalah sebagai berikut :

a. Distrik Liu bawahannya antara lain :

Kampung Botolu
Kampung Toddang Salo
Kampung Cilellang
Kampung Bila Liu

b. Distrik Ugi bawahannya antara lain :

Kampung Bila Ugi
Kampung KaE
Kampung Manyili
Kampung Salo TenggaraE
Kampung Salo Pekko
Kampung Kaung

c. Distrik Wage bawahannya antara lain :

Kampung Sompe
Kampung Canru
Kampung Paserru
Kampung Caleko
Kampung Sumpa Baka
Kampung Lampajo
Kampung Masappa
Kampung Bontotene.

5. Anabanua.

Struktur Pemerintahan Desa sebelum Pelita (1950 – 1965). Struktur pemerintahan desa pada periode 1950 – 1965 dikenal dengan istilah Distrik atau *Wanua* (sekarang Kecamatan). Sekarang jumlah distrik/wanua yang pada waktu itu adalah dua, yaitu : Distrik Anabanua, dan Distrik Gilirang.

Distrik Anabanua mempunyai tiga wanua bawahan yaitu :

- a. Awo Tarae
- b. Kalola
- c. Lawa Tanae

Sedangkan Distrik Gilirang tidak mempunyai wanua bawahan. Kedua distrik tersebut di atas membawahi beberapa kampung yaitu :

- a. Distrik Anabanua bawahannya adalah :

Kampung BuloE
Kampung Lakadaun
Kampung Lompo Palia
Kampung Bola Mallimpong
Kampung Alau Salo
Kampung Jongkang
Kampung Salodua
Kampung Callaccu
Kampung Langka Uttu
Kampung AwattanaE.

- b. Distrik Gilirang bawahannya adalah :

Kampung Lamata
Kampung Baru
Kampung Labempa
Kampung Laesang
Kampung Laputeng
Kampung Alausalo
Kampung Watang Gilireng
Kampung Ale Limpo
Kampung Arajang
Kampung Lawareng

6. T a n c u n g .

Struktur Pemerintahan Desa sebelum Pelita (1950 – 1965).

Pada periode sebelum Pelita, struktur pemerintahan desa dikenal dengan istilah Distrik (sekarang kecamatan). Distrik tersebut terbagi atas dua, yaitu :

Distrik Lowa

Distrik Tancung

Kedua distrik tersebut di atas mempunyai nama lain masing-masing, yakni :

Distrik Lowa disebut juga Sulewatang Lowa.

Distrik Tancung disebut juga Sulewatang Tancung.

Di samping itu tiap distrik membawahi beberapa kampung, yaitu :

a. Distrik Lowa (Sulewatang Lowa) bawahannya adalah :

Kampung Watang Lowa

Kampung Paloppo

Kampung Dori-Dori

Kampung Awata

Kampung Ujukkessi

Kampung Bacu-Bacu

Kampung Tonrong

b. Distrik Tancung (Sulewatang Tancung) bawahannya adalah :

Kampung Labuan Patu

Kampung Cenranae

Kampung Bontouse

Kampung Tancung

Kampung Ujunge

Kampung Pajalele

Kampung Baru Impa-Impa

Kampung Jumpa-Jumpa

Kampung Empagae

Kampung Mario

Kampung Ka'E

Kampung Palippu

Kampung Wae Tuwo

Kampung Ciro Wali

Kampung Baru Tancung

7. Gattareng.

Struktur Pemerintahan pada saat itu (1950 – 1965) karena masih terdiri dari tiga buah kampung, adalah sebagai berikut :

Kepala Kampung (Ade)



Dalam hal menjalankan pemerintahan, segala sesuatunya terpusat pada Kepala Kampung (*Ade*) dengan kata lain roda pemerintahan dilaksanakan oleh satu tangan, karena tugas *Sariang* hanya menyampaikan pesan Kepala Kampung kepada rakyat.

8. D a m p a n g .

Pada periode 1950 – 1965 Desa Dampang dikuasai oleh gerombolan DI/TII. Kepala Pemerintahannya pada saat itu yang masih bergelar *Jennang* (*Jennang Dampang*) mengungsi masuk ke kota, namun pemerintahan tetap dijalankan di tempat pengungsian.

Struktur Pemerintahan di Desa Dampang pada saat itu agak kacau dan tidak semestinya karena pengaruh keadaan struktur yang ada dan diperlukan adalah sebagai berikut :

Jennang (Kepala Desa)



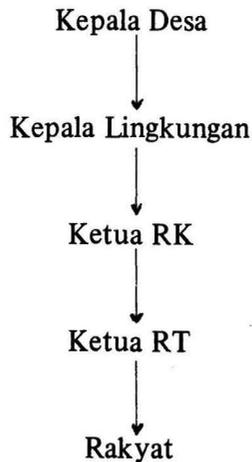
Mekanisme dari pada struktur tersebut di atas, adalah seluruh persoalan pemerintahan berada pada satu tangan, yaitu *Jennang* (Kepala Desa), sedangkan *Sariang* hanyalah bertugas untuk menyampaikan perintah kepada rakyat.

9. Matekko.

Struktur pemerintahan sebelum Pelita (1950 – 1965) di desa Matekko pernah terdiri empat kampung, kemudian menjadi dua desa. Struktur pemerintahan semasa empat kampung adalah sebagai berikut :



Sedangkan struktur pemerintahan semasa dua desa adalah :



Apabila dilihat struktur pemerintahan pada periode kampung maka dinamika pemerintahan terletak pada satu tangan, yaitu Kepala Kampung sedangkan tugas Sariang hanya menyampaikan perintah dan mengumumkan kepada penduduk.

Adapun dinamika pemerintahan pada masa dua desa sesuai struktur tersebut di atas, sudah agak lebih karena Kepala Desa telah mendapat bantuan dari Kepala Lingkungan dan Ketua RK/RT namun pada tingkat Kepala Desa masih dipegang oleh satu tangan, yaitu Kepala Desa sendiri.

D. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA.

1. Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo.

Cara pemilihan kepala kampung dilaksanakan secara demokrasi dan dipilih dari calon yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh tua-tua masyarakat. Kriteria seseorang dapat dicalonkan sebagai calon kepala kampung, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga desa yang telah dewasa.
- b. Berdarah bangsawan.
- c. Mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat (kaya).
- d. Berwibawa.
- e. Mempunyai/didukung sekurang-kurangnya 70 penduduk dari tua-tua masyarakat.
- f. Telah memenuhi kewajiban sebagai pembayar pajak/pareja.

Yang berhak memilih adalah mereka yang telah dikenakan pajak dan *pareja*, khususnya pria sedang wanita dan janda tak diperkenankan memilih dan dipilih. Yang memperoleh suara terbanyak itulah yang berhak menjadi kepala kampung.

Kepala Lembang, dipilih oleh semua orang dewasa tanpa kecuali. Seseorang dapat dicalonkan sebagai calon kepala Lembang bila telah memenuhi kriteria sebagaimana kriteria calon kepala kampung.

Seorang calon dikatakan menang dan berhak menjadi Kepala Lembang tidak semata-mata didasarkan atas suara terbanyak saja, tetapi harus mencapai *qorum*, artinya seorang calon harus mendapat suara terbanyak $\frac{1}{2}$ kali jumlah banyaknya pemilih.

Misalnya : Jumlah pemilih 100 orang dan jumlah calon enam orang. Yang berhak memenangkan pemilihan ini adalah calon yang memperoleh 25 suara dan memperoleh jumlah yang terbanyak dari calon yang lain. Apabila calon tersebut memperoleh suara terbanyak tapi tidak mencapai *qorum* tidak dapat dinyatakan sebagai

pemenang. Misalnya dari 100 pemilih tadi seorang calon dari keenam calon tadi memperoleh suara 20 sedang sisanya lima calon tadi rata-rata memperoleh suara 16 setiap calon, calon yang memperoleh suara 20 tadi tidak dapat dinyatakan menang walaupun mempunyai suara yang terbanyak dari kelima calon lainnya.

2. Sompe, Anabanua dan Tancung.

Cara pemilihan pemimpin pemerintahan desa sebelum Pelita (periode 1950 – 1965) yaitu :

a. Bersifat warisan turun temurun.

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa di Desa Sompe sebelum Pelita penduduknya adalah sebahagian terdiri dari keturunan raja (bangsawan) dan berada, maka pada waktu itu umumnya yang memegang pemerintahan adalah orang-orang yang berketurunan bangsawan. Dalam hal ini sistem pemilihan pemimpin pemerintahan ditunjuk langsung dari keturunannya, sebab menurut mereka yang berhak untuk menggantikan/mewarisi kepemimpinan hanya dari keturunan mereka.

b. Dipilih langsung oleh rakyat.

Cara pemilihan ini adalah dilaksanakan apabila terjadi persaingan golongan (golongan bangsawan), di mana rakyat mengajukan tiga calon kemudian diadakan pemungutan suara dengan memasukkan ke dalam amplop lalu disimpan di dalam kotak pemungutan suara. Dalam hal ini mana yang terbanyak suaranya itulah yang berhak menjadi pemimpin pemerintahan desa.

3. Gattareng, Dampang dan Matekko

Cara pemilihan Pempimpin Pemerintahan Desa. Menurut tradisi di Kecamatan Gangking yang mewilayahi Desa Gattareng, Matekko, Dampang, pemilihan Kepala Kampung (*Adat*) dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Demikian pula pemilihan Kepala Kampung (*Gelar Jennang*) dilaksanakan secara langsung, yaitu dengan memilih satu di antara tiga orang calon yang diusulkan. Calon yang mendapat suara terbanyak kemudian diajukan kepada camat (*Karaeng*) untuk disahkan selanjutnya Sariang hanya ditunjuk

oleh Kepala Kampung (*Jennang*) atas persetujuan Camat (*Karaeng*).

E. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH.

1. Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo

Yang dikategorikan atau disebut sebagai pemimpin masyarakat sesuai penjelasan Petrus Bande dan Petrus Patiun masing-masing sebagai pegawai desa dan sekretaris Desa adalah tua-tua masyarakat yang dianggap oleh masyarakat cukup bijaksana dalam mengambil keputusan dan berwibawa. Kebanyakan dari mereka adalah pensiunan guru, pendeta, pensiunan pejabat pemerintah dan bangsawan di desa itu dan rata-rata umur mereka di atas 60 tahun. Kedudukan mereka cukup terpendang dan tinggi. Hal ini nampak sekali dalam upacara-upacara adat di mana mereka disediakan tempat khusus/ Lembang demikian pula cara duduknya. Juga setiap keputusan senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan tanpa pamrih. Demikian pula dalam hal pemotongan kerbau dan babi mereka senantiasa mendapat bagian yang lebih banyak dan baik dari yang lainnya.

Di dalam pembangunan dan pembinaan desa, peranan mereka sangat menentukan. Hal ini nyata sekali dalam hal mencari dana swadaya dan penggunaannya mereka yang paling banyak menentukan. Demikian pula dalam hal pengerahan tenaga masyarakat untuk mengadakan pekerjaan gotong royong mereka sangat berperan juga merekalah yang sering mengadakan deteksi dan monitoring penggunaan dana-dana subsidi baik dari Pemerintah pusat maupun daerah.

2. Sompe, Anabanua dan Tancung

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah. Sebagaimana pada umumnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Sabbang Paru, terutama Desa Sompe didapati juga beberapa orang pemimpin masyarakat non Pemerintah yang mempunyai keahlian masing-masing seperti keahlian di bidang pertanian, nelayan, meteorologi dan agama, yang kedudukan mereka di atas adalah sama dengan anggota masyarakat lainnya, hanya di antara mereka itu mempunyai peranan penting bagi masyarakat

desa karena memiliki keahlian tersendiri seperti yang dikenal namanya waktu itu adalah *Matoa Tani* (nama gelaran) sedang nama aslinya adalah *Malloco*.

Peranannya dalam memberikan petunjuk dan nasehat kepada masyarakat tani serta menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat baik di waktu musim penanaman padi maupun di waktu musim panen. Begitu pula pemimpin di bidang nelayan juga dikenal dengan nama gelarannya adalah *Matoa Pakkaya* sedang nama sebenarnya adalah *Sagala* dan peranannya, yaitu memberikan nasehat atau petunjuk kepada masyarakat nelayan terutama bila diadakan pesta-pesta nelayan seperti pada waktu mengadakan lomba perahu. Demikian pula pada pemimpin meteorologi dan agama senantiasa memberikan nasehat dan petunjuk serta menjawab pertanyaan masyarakat yang memerlukannya, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Hanya mereka itu mempunyai peranan penting bagi masyarakat karena memiliki keahlian tersendiri seperti yang dikenal pada waktu itu nama gelarannya disebut *Puang Matoa* nama sebenarnya adalah Andi Kadu. Peranannya adalah di samping ahli di bidang agama juga ahli di bidang ilmu-ilmu lain sehingga pada waktu itu ditunjuk sebagai pembawa aspirasi masyarakat.

Selain dari pada itu dikenal pula dengan nama gelaran *Matoa Tani* yang sebenarnya adalah *Masseleang*. Peranannya adalah memberikan petunjuk dan nasehat kepada masyarakat tani serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat baik pada waktu musim penanaman padi maupun di waktu musim panen padi.

Pada umumnya di desa-desa yang ada di desa-desa Anabanua dan Tancung, terutama di Desa Tancung didapati juga beberapa orang pemimpin masyarakat non-pemerintah yang mempunyai keahlian masing-masing seperti keahlian di bidang pertanian, nelayan, meteorologi dan agama, di mana kedudukan mereka tersebut adalah sama kedudukannya dengan anggota masyarakat lainnya. Hanya di antara mereka itu mempunyai peranan penting bagi masyarakat desa karena memiliki keahlian tersendiri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang dikenal nama gelarannya pada waktu itu adalah *Matoa Tani* sedang nama aslinya *Sentere* yang peranannya sebagai pemimpin petani dan senantiasa memberikan petunjuk dan nasehat kepada masya-

rakat tani serta menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat baik di waktu musim penanaman maupun di waktu musim panen. Begitu pula pemimpin di bidang nelayan juga dikenal dengan nama gelarannya adalah Matoa Pakkaya, sedang nama sebenarnya adalah *Banna* peranannya yaitu memberikan nasehat kepada masyarakat nelayan seperti pada waktu mengadakan perlombaan perahu. Demikian pula pada masyarakat yang keahliannya di bidang meteorologi dan agama senantiasa memberikan petunjuk dan nasehat serta menjawab segala pertanyaan masyarakat yang memerlukannya baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

3. Gattarong, Dampang dan Matekko

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat dan Pemerintah. Pada periode sebelum Pelita (1950 – 1965) di Desa Gattarong ada empat orang yang dianggap/sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat :

- a. H. Toddo
- b. Malluluang
- c. H. Ismail.

Keempat tokoh atau pemimpin masyarakat non-pemerintah tersebut di atas, masing-masing mempunyai keahlian seperti pertanian, perbintangan (falakiah), kemasyarakatan dan agama. Kedudukannya sama dengan anggota masyarakat biasa. Peranannya ialah memberikan nasehat atau jawaban kepada masyarakat yang memerlukannya, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Dalam hal peranan pemimpin non pemerintahan tersebut mempunyai peranan dalam hal memberikan pertimbangan kepada Kepala Kampung (*Ade*) pada saat diadakan musyawarah, misalnya musyawarah yang diadakan oleh Kepala Kampung mengenai kapan sebaiknya mulai turun ke sawah.

Pemimpin masyarakat non-pemerintah di Desa Dampang ada beberapa orang, yaitu orang-orang yang disuarakan oleh masyarakat karena pengalamannya dan karena pengetahuannya atau keahliannya pada satu atau lebih dari bidang tertentu, seperti ahli dalam soal keagamaan, kemasyarakatan, pertanian, perbintangan, pemerintahan dan lain-lain.

Kedudukan orang-orang tersebut di atas mempunyai keisti-

mewaan dibanding dengan anggota masyarakat lainnya. Kedudukan yang istimewa ini diberikan oleh masyarakat dan pemerintah desa secara tidak langsung, seperti dihormati, pembebasan dari kewajiban tertentu dan sebagainya. Peranannya ialah memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat kepadanya baik secara perorangan maupun berkelompok, memberikan nasehat (dakwah), memberikan pertimbangan, saran-saran yang berguna apabila diminta oleh pemerintah desa.

Sebagaimana pada umumnya di desa-desa dalam Kecamatan Gangking, di Desa Matekko pun terdapat beberapa orang pemimpin masyarakat non-pemerintah dengan keahlian masing-masing seperti ahli di bidang pertanian, sosial perbintangan dan agama. Kedudukannya sama saja dengan kedudukan anggota masyarakat lainnya. Peranannya, ialah memberikan nasehat, petunjuk dan jawaban-jawaban terhadap masyarakat yang memerlukannya baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

F. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN PEMERINTAH

1. Pangli Palawa

a. Keadaan Organisasi Politik.

Organisasi Politik di desa ini tumbuh dan berkembang sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu pada saat atau zamannya pemerintah mengakui atau merestui kehidupan banyak partai, di desa ini tumbuh dan banyak partai dan bersaing, tapi persaingan mana masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak sampai pada bentrokan fisik. Demikian pula pada saat 10 partai, keadaannya sama seperti banyak partai di mana sering terjadi persaingan yang cukup keras diantara sesamanya tapi tidak sampai mengarah pada bentrokan fisik, hal ini disebabkan karena kesadaran beragama sudah cukup tinggi dan adanya pandangan bahwa mereka adalah satu suku, yaitu Suku Toraja.

b. Organisasi Non Politik

Sejak zaman Belanda dulu organisasi-organisasi non politik ini tumbuh subur dan yang paling menonjol adalah apa yang disebut

saran. Organisasi ini dapat dikatakan sebagai kelompok kerja. Karena melalui organisasi ini aspirasi-aspirasi rakyat ditampung dan dirapatkan secara bersama yang akhirnya apabila aspirasi disetujui dan diterima oleh kelompok maka itu diputuskan, yang merupakan keputusan kelompok yang harus dilaksanakan oleh semua anggota. Demikian pula dalam memobilisasi dana swadaya masyarakat selalu melalui saran ini, demikian pula pembangunan-pembangunan apa yang cocok dilaksanakan di desa ini senantiasa diputuskan melalui saran ini.

2. Sesean Suloara

Sampai akhir tahun 1965 tidak ditemukan organisasi, baik politik maupun non-politik meskipun ada orang yang menjadi anggota.

3. Sadan Matallo.

Sebagaimana di Sesean Suloara di sini pun tidak ada data lengkap tentang organisasi.

4. Sompe

a. Organisasi Politik Sebelum Pelita

Organisasi Politik yang ada di desa Sompe sebelum Pelita adalah sebagai berikut :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
P S I I	Aktif
N U	Aktif
P N I	Aktif
I P K I	Aktif

Organisasi Politik tersebut di atas ketika menjelang Pemilu 1955 terjadi persaingan golongan sehingga Parpol yang ada pada waktu itu giat melaksanakan Kampanye dalam rangka memenangkan partainya masing-masing, namun sesudah Pemilu 1955 sampai 1965 Parpol tersebut di atas tinggal nama saja.

Organisasi Politik sejak Pelita sampai sekarang. Menjelang Pemilu 1972 organisasi politik (parpol) sudah tidak ada lagi, tetapi yang ada hanyalah Golongan Karya (Golkar) yang dikenal dengan Pelopor Pemerintahan Orde Baru hingga sampai sekarang keadaannya tetap aktif.

b. Organisasi Non Politik

Sebelum Pelita (1950 – 1965) organisasi non politik yang ada didesa Sompe ialah :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PGRI	Aktif
Muhammadiyah	Aktif
Soksi	Aktif

5. Anabanua

a. Organisasi Politik sebelum Pelita (1950 – 1965)

Organisasi politik yang ada di Anabanua sebelum Pelita adalah sebagai berikut :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PSII	Aktif
NU	Aktif
PNI	Aktif
IPKI	Aktif

Organisasi tersebut di atas pada saat menjelang Pemilu tahun 1955 telah aktif pula melaksanakan kampanye guna memenangkan partainya masing-masing. Namun sesudah Pemilu 1955 sampai 1965 Parpol tersebut di atas tidak ada lagi, walaupun ada hanya nama saja karena tidak pernah nampak lagi kegiatan-kegiatannya.

b. Organisasi politik sejak Pelita sampai sekarang.

Pada periode Pelita, setelah organisasi politik (Parpol) sudah tidak ada maka yang ada hanyalah Golongan Karya (Golkar) yang dikenal dengan pelopor Pemerintahan Orde Baru hingga sampai sekarang keadaannya tetap aktif.

c. Organisasi Non Politik

Pada periode sebelum Pelita organisasi non-politik yang ada di desa Anabanua adalah :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PGRI	Aktif
Muhammadiyah	Aktif
Soksi	Aktif

d. Organisasi non politik sejak Pelita sampai sekarang.

Pada periode Pelita sampai sekarang organisasi non politik yang ada di desa Anabanua yaitu :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PGRI	Aktif
KORPRI	Aktif
Soksi	Aktif
Dharma Wanita	Aktif

Organisasi non-politik tersebut di atas sejak Pelita telah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan arisan, kursus-kursus ketrampilan PKK dan lain-lain sebagainya.

6. T a n c u n g

a. Organisasi politik sebelum Pelita.

Organisasi politik yang ada di Desa Tancung sebelum Pelita adalah :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PSII	Aktif
N U	Aktif
P N I	Aktif
IPKI	Aktif

Organisasi politik tersebut di atas ketika menjelang Pemilu 1955 giat melaksanakan kampanye dalam rangka memenangkan partainya

masing-masing, namun sesudah Pemilu 1955 – 1965 Parpol tersebut di atas sudah tidak ada lagi, walaupun kalau ada hanya nama saja sebab menurut hasil penelitian yang diperoleh Parpol tersebut di atas tidak pernah disebut-sebut lagi dan tidak pernah terhenti kegiatan-kegiatannya.

b. Organisasi politik sejak Pelita sampai sekarang.

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
Golkar	Aktif

Menjelang Pemilu 1972 sebagaimana telah diketahui bahwa organisasi Parpol sudah tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah Golongan Karya (Golkar) yang dikenal dengan Pelopor Pemerintahan Orde Baru hingga sampai sekarang keadaannya tetap aktif.

c. Organisasi non politik

Sebelum Pelita (1950 – 1965) organisasi non politik yang ada di desa Tancung adalah :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PGRI	Aktif
Muhammadiyah	Aktif
Soksi	Aktif

Organisasi non politik sejak Pelita :

<u>N a m a</u>	<u>Keadaannya</u>
PGRI	Aktif
KORPRI	Aktif
Dharma Wanita	Aktif
Soksi	Aktif

Dari organisasi non-politik tersebut di atas sejak Pelita sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan arisan, kursus ketrampilan PKK dan lain-lain sebagainya.

7. Gattareng

Keadaan organisasi politik dan non-politik

a. Organisasi politik.

Di Desa Gattareng pada periode 1950 – 1965 tidak ada organisasi politik, hanya ada beberapa orang anggotanya, karena pada saat itu dikuasai oleh Gerombolan DI/TII yang tidak membenarkan adanya organisasi politik di dalam wilayah kekuasaannya.

b. Organisasi non-politik.

Organisasi non-politik pun tidak ada, kecuali anggotanya ada, yaitu anggota Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah lebih banyak dibanding dengan anggota organisasi politik karena organisasi Muhammadiyah pada saat itu lebih ditolerir oleh Gerombolan DI/TII dari pada organisasi politik.

8. Dampang

Keadaan organisasi politik dan non politik

a. Organisasi politik

Di Desa Dampang sebelum Pelita tidak terdapat induk organisasi politik baik berupa cabang maupun ranting yang ada hanya anggota organisasi politik, seperti Masyumi, NU, PSII pada periode Pemilu 1955.

b. Organisasi non-politik.

Organisasi non-politik yang ada di desa Dampang satu-satunya ialah Muhammadiyah maupun Aisyiyah mempunyai induk yang berstatus Ranting. Kegiatannya ialah di bidang usaha-usaha sosial dan dakwah Islamiyah.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Desa Dampang pada periode 1950 – 1965 dikuasai oleh DI/TII dan pada Pemilu 1955 ada beberapa anggota TPS yang dibunuh dan ditangkapi karena tidak ditolerir adanya Pemilu. Hal ini pulalah yang menyebabkan tidak suburnya organisasi politik.

9. Matekko

Keadaan organisasi politik dan politik

a. Organisasi politik

Pada periode tahun 1950 – 1965, yaitu dalam periode Pemilu 1955 ada dua organisasi politik yang berkedudukan di Desa Matekko (Kampung Ponre) yang kebetulan juga menjadi ibu kota Kecamatan.

Organisasi politik di atas adalah organisasi/Partai Masyumi dan NU, yang masing-masing berstatus Cabang. Menjelang Pemilu 1955 kedua Papol tersebut di atas giat melaksanakan kampanye dalam rangka memenangkan partainya masing-masing, namun sesudah Pemilu 1955 – 1965 partai tersebut tinggal hanya namanya saja.

b. Organisasi non-politik

Organisasi non-politik yang ada, ialah Muhammadiyah dan Aisyiyah yang masing-masing berstatus cabang. Sesuai dengan corak organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah yaitu organisasi sosial dan dakwah Islamiyah, maka kegiatannya hanya bergerak di bidang sosial dan dakwah Islamiyah. Jasanya terhadap kehidupan masyarakat di Desa Matekko cukup banyak, antara lain dengan melalui sekolah yang dibangunnya, yaitu sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah.

G. KEADAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN

1. Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo

Sebagaimana halnya desa-desa di Sulawesi Selatan yang pada umumnya bersifat agraris, maka penduduk ketiga desa sampel di Dati II Tana Toraja mayoritas bergerak atau bermata pencaharian sebagai petani dengan sistem tanam sekali setahun. Dalam hal pengaturan waktu untuk memulai turun sawah, penduduk sampai periode tahun 1950 – 1965 masih mempergunakan cara-cara tradisional, antara lain dengan berpedoman pada tanda-tanda alam. Dalam hal itu, penduduk biasanya baru akan memulai pengelolaan sawah ladangnya apabila telah tampak akan turunnya hujan.

Selama belum tampak tanda-tanda alam tersebut, tidak ada seorang pun yang berani mulai turun ke sawah, karena katanya menghindari gangguan hama dan kekeringan. Sementara itu, penduduk di dalam mengerjakan sawah ladangnya masih jarang mempergunakan cangkul dan alat sejenis lainnya, akan tetapi banyak

di antara mereka hanya mempergunakan tangan tanpa alat apa pun. Apabila ditemukan jenis tanah yang berbatu-batu atau tanah kering, barulah mereka mempergunakan alat yang terdiri dari sepotong kayu yang pada salah satu ujungnya diberi besi tajam.

Selain dari pada kegiatan pertanian, pemeliharaan babi termasuk mata pencaharian pokok bagi penduduk. Demikian, dalam setiap rumah tangga di desa-desa itu, biasanya mempunyai babi peliharaan, minimal dua sampai 10 ekor. Menurut anggapan sebahagian penduduk, bahwa mereka yang tidak memelihara babi merupakan pertanda kemalasan, malahan dianggap tidak menuruti pantangan-pantangan atas kepentingan dan harusnya memelihara ternak babi itu. Kenyataan seperti itu berbeda dengan tempat atau desa-desa di luar Dati II Tana Toraja, di mana kebanyakan orang lebih suka memelihara ternak kerbau. Walaupun bagi orang-orang Toraja pada umumnya secara tradisional memberikan arti khusus kepada kerbau, sebagai *Tedong Garonto' Enan* atau kerbau sebagai harta yang perlu dimiliki, namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga di ketiga tempat tersebut memiliki kerbau. Hal itu antara lain disebabkan karena kadangkala seseorang mempunyai harta milik berupa kerbau tetapi tidak dipeliharanya sendiri, melainkan dipercayakannya kepada orang lain yang memang pekerjaannya memelihara ternak.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa sistem pengolahan sawah biasanya hanya dilakukan sekali dalam setahun, penduduk kebanyakan memelihara pula ikan di sawah. Ikan tersebut biasanya diambil oleh pemiliknya dua kali dalam setahun, di samping juga dapat sewaktu-waktu diambil untuk keperluan sehari-hari di rumah tangga. Pemungutan hasil ikan tersebut dilakukan bersama dengan waktu turun ke sawah dan pada waktu selesai panen. Pada musim tanam, benih-benih ikan sekaligus ditaburkan di sawah-sawah dengan titik pusat penyebaran pada bagian sawah yang disediakan khusus untuk keperluan itu. Hasil-hasil ikan biasanya dijual di pasar Rantepao, pasar Batu Temonga, dan tempat lain di sekitarnya.

Pembuatan tembikar, dapat dikatakan salah satu mata pencaharian tambahan yang tidak terus menerus dikerjakan atau dilakukan. Pembuatan tembikar dilakukan hampir oleh seluruh penduduk yang berusia tua di waktu menunggu musim panen. Tampaknya pekerjaan membuat tembikar itu kebanyakan dilakukan oleh mereka

yang sudah terhitung berumur agak tua, sedangkan sebagian terbesar dari kalangan orang muda di tempat-tempat tersebut tidak melakukan kegiatan pembuatan tembikar, meskipun pada dasarnya mereka sudah memiliki kepandaian untuk itu. Bahan-bahan pembuatan tembikar biasanya diambil atau didatangkan dari desa lain, seperti Sangkuru.

2. Sompe, Anabanua dan Tancung.

a. Sompe

Keadaan perekonomian masyarakat di Sompe.

Luas areal persawahan yang ada.

Luas areal persawahan sebelum Pelita dan sejak Pelita sampai sekarang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Periode	Luas Areal/Ha	Ket.
1.	Sebelum Pelita (akhir 1965)	2.529.00 ha	
2.	Sejak Pelita Sampai sekarang	2.529.00 ha	

Sumber : Kandep P dan K Kecamatan Sabbang Paru sebagai dokumentasi.

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa, di Desa Sompe sebelum Pelita sebagaimana telah dikemukakan pada periode tahun 1950 – 1965 pernah dimasuki pasukan DI/TII sehingga pada waktu itu masyarakat desa mengalami hambatan dan kesulitan untuk mencari nafkah hidupnya. Walaupun demikian oleh karena pokok pencaharian masyarakat desa pada waktu itu adalah sebahagian besar di sektor pertanian, maka dalam hal ini masyarakat Desa Sompe pada waktu tersebut tetap melaksanakan pekerjaannya (bertani) walaupun waktunya terbatas, sehingga hasil yang dicapai di dalam menggarap tanah persawahan pada periode tersebut juga terbatas (tidak tergarap keseluruhannya).

b. Anabanua

Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Luas areal persawahan yang ada

Luas areal persawahan yang ada sebelum Pelita dan sejak Pelita sampai sekarang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Periode	Luas Areal/Ha	Ket.
1.	Akhir 1965	57,99 ha	
2.	Tahun 1981	57,99 ha	

Sumber : Kantor Kecamatan Maniang Pajo.

Hasil panen padi per hektar sebelum Pelita 1950 – 1965. Perlu diketahui bahwa di Desa Anabanua sebelum Pelita sebagaimana telah dikemukakan terdahulu telah diganggu oleh pasukan Gerombolan DI/TII sehingga kegiatan masyarakat desa dalam mengerjakan persawahan mereka mengalami hambatan atau kesulitan pada waktu itu. Namun demikian pada saat itu masyarakat desa terutama masyarakat tani tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun waktunya terbatas, karena pokok pencaharian masyarakat desa pada saat itu sebagian besar di sektor pertanian.

Dalam hal tersebut di atas maka hasil yang dicapai di dalam menggarap sawah mereka tidak begitu memadai sebab penggarapan tanah persawahan pada periode tersebut juga terbatas sehingga tanah persawahan yang ada tidak tergarap keseluruhannya.

c. Tancung.

Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Luas areal persawahan yang ada di Desa Tancung sebelum Pelita dan sejak Pelita sampai sekarang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Periode	Luas Areal/Ha	Ket.
1.	Sebelum Pelita (1950 – 1965)	4032,87 Ha	
2.	Sejak Pelita sampai sekarang	4032,87 Ha	

Sumber : Kantor Kecamatan Tanasitolo sebagai dokumen.

Terlebih dahulu perlu diketahui, bahwa di Desa Tancung sebelum Pelita, sebagaimana telah dikemukakan pada periode tahun 1950 – 1965 kehidupan pencaharian masyarakat desa di samping bekerja di bidang pertanian juga bekerja di bidang perdagangan. Maka pada waktu itu tanah persawahan yang digarap masyarakat tidak tergarap keseluruhannya sehingga hasil yang dicapai pada panen padi tidak begitu memadai. Dan juga pada waktu itu pemerintah belum mendapat perhatian terhadap peningkatan hasil di sektor pertanian.

3. Gattareng, Dampang dan Matekko

a. Gattareng

Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pada periode tahun 1950 – 1965 Desa Gattareng dikuasai oleh Gerombolan DI/TII dengan keadaan darurat perangnya. Keadaan yang demikianlah menyebabkan keadaan perekonomian masyarakat menjadi tidak normal semuanya sebab darurat. Pada umumnya masyarakat bekerja di tempat pertaniannya sekedar untuk mendapatkan makan dan pakaian ala kadarnya.

Masyarakat pada saat itu mendapat tekanan dari Gerombolan DI/TII, antara lain dilarang membeli langsung barang-barang di kota, kecuali melalui orang-orang yang telah ditunjuk, dilarang makan gula pasir, dilarang memakai pakaian yang baik-baik, soalnya makan, pakain dan perumahan harus sederhana mungkin dan sesuai kebutuhan minimal. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan masyarakat kurang bergairah dalam hal perekonomian.

b. Dampang

Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa Desa Dampang pada periode tahun 1950 – 1965 dikuasai oleh Gerombolan DI/TII yang memperlakukan keadaan darurat perang. Untuk men-sukseskan tujuan perjuangan DI/TII pada saat itu segala daya dan dana yang ada dalam wilayah kekuasannya digunakan, termasuk masalah perekonomian masyarakat Desa Dampang.

Dengan perlakuan keadaan darurat perang yang sewaktu-waktu terjadi bentrokan antara DI/TII dengan TNI, maka masya-

rakat selalu merasa terancam kedudukannya dalam menggarap pertaniannya di samping hasil pertanian yang ada digunakan lagi oleh pihak DI/TII untuk dana tujuan perjuangannya.

Kesimpulannya perekonomian masyarakat Desa Dampang pada periode 1950 – 1965 menjadi merosot.

c. Matekko

Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.

Terlebih dahulu perlu diketahui, bahwa di Desa Matekko dalam periode tahun 1950 – 1965, sebahagian besar waktunya berada dalam situasi tekanan Gerombolan DI/TII. Puncak dari pada tekanan Gerombolan DI/TII melancarkan pembakaran rumah penduduk di pinggiran kota, termasuk puluhan rumah penduduk musnah di makan api sehingga penghuninya lari masuk kota (kota Kecamatan). Sumber penghidupan penduduk (sawah pertanian) telah ditinggalkan, untuk menanggulangi masalah penampungan pengungsi tersebut pemerintah membuatkan bangsal penampungan.

Keadaan yang demikian menjadikan perekonomian masyarakat hancur sama sekali. Sedangkan masyarakat yang tetap tinggal di kampung (tidak mengungsi) berarti mereka tinggal di daerah rawan (perbatasan), yaitu kadang-kadang menjadi tempat pertempuran antara TNI dengan DI/TII. Nanti pada awal tahun 1963 setelah gerombolan menggabung ke TNI, barulah penduduk berangsur-angsur pulang ke kampung asalnya masing-masing, namun keadaan masih dalam situasi sulit, karena pada saat itu adalah periode pra G. 30 S/PKI.

H. KEADAAN SOSIAL BUDAYA

Perkembangan suatu desa (*stage of development*), selain dipengaruhi oleh faktor-faktor hasil karya manusia, maka faktor-faktor sosial budaya masih merupakan faktor "penyebab" atau sebagai "akibat" dalam tingkat pertumbuhan suatu desa. Faktor-faktor sosial budaya di desa-desa sampel, adalah sebagai berikut :

1. Pelapisan Sosial

a. Pelapisan Sosial.

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial budaya bagi desa-

desa sampel, pembahasan ini difokuskan dalam dua bahagian, yakni desa-desa yang terletak di Dati II Tana Toraja, dan desa-desa yang berada di daerah Bugis, baik yang berada di Dati II Wajo maupun yang terletak di Dati II Bulukumba.

Bagi kehidupan masyarakat di desa-desa Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Sadan Matallo, pada garis besarnya ditemukan tiga penggolongan dari lapisan sosial, yakni golongan *tomakaka* (*tana'karurung*), golongan *tominaa* (*tominawa*), dan golongan *bulo' dia'pa'* (*tana' kua kua*).

Golongan tomakaka adalah orang-orang merdeka atau orang-orang yang tidak diperintah oleh lapisan lain, dan sebahagian lapisan ini telah dapat diangkat sebagai pimpinan masyarakat kelompoknya. Golongan inilah yang dianggap mempunyai kedudukan tertinggi di Dati II Tana Toraja. Golongan ini terbagi pula kepada berbagai golongan, yaitu :

- 1) *Garopang*, adalah suatu kedudukan yang terhormat dari salah satu kerabat tongkonan dan bertujuan untuk pengukuhan kerabat, sekaligus mendiami rumah kerabat (*tongkonan*) yang dipimpinya. Sehubungan dengan kedudukan seorang Garopang di dalam membina dan memprakarsai perencanaan dan pembangunan rumah tongkonannya (rumah kerabat), adalah terkemuka di dalam mengambil inisiatif untuk pengumpulan biaya yang diperlukan. Selain itu, seorang garopang adalah juga pimpinan musyawarah kerabat, sehubungan dengan perencanaan upacara *rambusolo* dan upacara *rambu tuka'*, bahkan ia juga penanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi dalam kelompok kerabatnya.
- 2) *Tulak Bala*, adalah jabatan yang dipegang seseorang untuk melindungi kerabat dan kelompok masyarakatnya. Kata tulak bala berarti tiang rumah yang berdiri di tengah-tengah bangunan rumah sampai di bubungan yang menopang atap di atasnya. Demikian, arti kata *bala* adalah sebagai pelindung kehidupan. Oleh karena itu, laki-laki yang menduduki jabatan ini adalah dianggap sebagai orang yang mempunyai keberanian dan pintar atau bijaksana dalam soal adat istiadat. Tugas seorang Tulak Bala di dalam kelompok kerabatnya adalah pendamping (penasehat) *Ambe' sardan* dari rumah tongkon-

an yang diwakilinya bersama. Dapat dikatakan bahwa tugas seorang Tulak Bala dengan garopang, adalah bersamaan dengan kedudukan yang berlainan.

- 3) *Tomakaka massang*, adalah *tomakaka* yang mempunyai kedudukan penting di dalam soal-soal adat dan pemerintahan pada kelompok masyarakat Saroang. Tomakaka inilah yang mempunyai dan menduduki tempat sebagai calon pimpinan Saroang dan disebut *ambe' saroang*. Selain itu, Tomakaka massang dapat menjadi pimpinan *Tepo padang* (bahagian, atau seperempat bagian tanah atau kampung) yang disebut dengan istilah *Tomantaa*.
- 4) *Anak Tomakaka*, yaitu keturunan Tomakaka yang belum atau tidak menjabat pimpinan masyarakat kelompok dan kerabatnya. Seorang anak Tomakaka dan keturunan lapisan tomakaka massang dapat menduduki jabatan *ambe' saroan*, *garopang*, *tulang bala* barulah ketomakakaannya diperoleh. Perlu dijelaskan di sini bahwa meskipun seseorang itu adalah keturunan langsung dari tomakaka yang akan digantikan pada saatnya nanti, namun jabatan-jabatan demikian tidaklah diperolehnya secara langsung dan otomatis, melainkan ditentukan dari hasil musyawarah kerabat yang memilihnya. Sementara golongan kedua, yakni *Tominaa*, adalah orang yang pandai berdoa dan menjadi penganjur di dalam persembahan. Dapat juga dikatakan bahwa orang-orang pada lapisan ini dengan jumlah jiwa yang terbatas bertugas untuk mengurus soal-soal kerohanian dan urusan perekonomian penduduk yang dikaitkan dengan kepercayaan asli (*Aluk Todolo*).

Apabila memperhatikan asal usul keturunan dari lapisan sosial ini, ternyata berasal dari lapisan rendah yang dikenal sebagai *Bulo' dia'pa'*. Kepintaran dan kemahiran, kaya akan pikiran, berbudi, bijaksana, pandai berdoa di hadapan persembahan menurut kepercayaan Aluk Todolo, berarti dapat mengubah lapisan sosial seseorang ke tingkat lapisan sosial yang lebih tinggi.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan sebagai Tomakaka, golongan Tominaa diperoleh bukanlah atas pengetahuan dan kepribadian yang disebutkan di atas tadi, sebagai suatu ukuran atau

persyaratan mutlak melainkan melalui keputusan musyawarah dari para ambe saroan dan pemuka masyarakat lainnya, atau usul masyarakat lainnya, atau usul Tominaan yang ada sebelumnya. Demikian jabatan sebagai Tominaan tidak diperoleh secara turun temurun.

5) *Bulo Dia'pa' atau Tana'kua kua*

Sebagai lapisan terendah dalam kehidupan masyarakat Toraja, disebut *Bulo Dia'pa'* atau *Tana' kua-kua*, yakni orang-orang suruhan dari lapisan Tomakaka atau orang-orang yang di bawah kekuasaan. Golongan ini terbagi kepada :

- a) *Kaunan Bulawan*, yaitu budak-budak yang sudah dibebaskan dari perhambaan tuannya, biasanya dengan membayar sejumlah babi dan kerbau yang diserahkan kepada tuannya. Jumlah pembayaran ini harus sama jumlah pembelannya dahulu kala, atau pun hutang yang telah diperbuatnya.
- b) *Kaunan Tai Manuk*, yaitu tingkatan budak terendah. Mereka ini adalah kaunan yang paling miskin dan tidak berpendidikan.

Demikianlah pelapisan sosial di kalangan masyarakat Tana Toraja, adapun pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis termasuk desa-desa Sompe, Anabanua, Tancung, Gattareng, Dampang dan Matekko masing-masing di Wajo dan Bulukumba, adalah sebagai berikut :

Secara garis besar, pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat Bugis pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu :

- 1) *Golongan Arung* (bangsawan), yaitu pelapisan kaum kerabat raja-raja. Golongan ini dibagi atas :
 - a) *Anak Arung*, yakni anak seorang raja yang lahir setelah ayahnya dilantik menjadi raja. Golongan seperti ini dikenal sebagai *Anak Mattola*, yaitu putra mahkota yang berhak menggantikan ayahnya menjadi raja, setelah raja meninggal dunia atau meletakkan jabatannya.
 - b) *Anakarung*, ialah anak yang lahir dari seorang raja sebelum ayah tersebut menjadi raja. Anak seperti ini dikenal dengan sebutan *anak pada*. Mereka itu dapat menjabat sebagai arung apabila anak Mattola tidak ada atau dianggap

tidak cakap mengendalikan tahta kerajaan. Perbedaan antara Anakarung dan anakarung hanya dari segi fungsi dalam memangku jabatan sebagai raja, namun kedudukannya sama dalam hal kebangsawanan, sehingga lahirnya suatu ungkapan "bangsawan tapi bukan anakarung atau raja".

- 2) *Golongan To Deceng dan To Maradeka*, ialah lapisan orang merdeka yang merupakan sebahagian besar dari rakyat Sulawesi Selatan. Golongan ini dibagi atas :
 - a) *Wija to deceng*, ialah keturunan orang baik-baik yang darahnya belum bercampur baur dengan keturunan hamba sahaya. Suatu pendapat mengatakan bahwa golongan To deceng ini pada dasarnya termasuk pula keturunan bangsawan, yaitu suatu proses perkawinan yang terjadi antara kaum bangsawan (Arung) dengan kaum bangsawan lain yang bukan arung atau raja, dari keturunan itulah lahir to deceng. Mereka ini dapat diangkat dan diberi wewenang untuk memerintah pada suatu kampung atau *Gella*. Namun demikian, sebagian pendapat mengatakan bahwa to deceng adalah anak arung yang sudah kawin dengan hamba sahaya, tetapi belum sampai tujuh lapisan keturunannya secara berturut-turut kawin dengan hamba sahaya. Keturunan semacam ini biasa dikenal dalam masyarakat Bugis sebagai *anak cerak*, artinya keturunan bangsawan yang darahnya sudah bercampur dengan keturunan hamba sahaya. Apabila keturunannya telah berlanjut selama tujuh lapis secara berturut-turut, maka dari keturunannya itulah disebut *to sama* artinya orang biasa. Kedua pendapat tersebut di atas ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa sesungguhnya to deceng itu lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan seorang yang bukan bangsawan, kemudian melahirkan seorang anak atau keturunan yang berstatus to deceng.
 - b) *To Maradeka* atau *to sama*, ialah keturunan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan, sering pula disebut orang to deceng yang sudah agak menurun tingkat sosialnya, disebabkan karena perkawinannya dengan keturunan hamba sahaya.

- 3) *Golongan ata* (hamba sahaya), orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar hutang atau orang-orang yang melanggar pantangan adat. Golongan ini terdiri atas orang-orang yang terikat kebebasannya karena berbagai hal seperti disebutkan di atas. Golongan ata ini terbagi kepada :
- a) *Ata Mana*, yaitu hamba yang sudah turun temurun dan tetap diwariskan oleh tuannya kepada keturunannya. Demikian hamba dari golongan ini tidak dapat diperhamba oleh orang-orang yang menjadi keturunan dari pada tuannya sendiri.
 - b) *Ata Akkarungeng*, terbagi atas dua bahagian yaitu, hamba istana dan ata arung. *Ata istana* (istana), ialah mereka yang mengabdikan diri di istana kerajaan khusus melayani *arajang*. Hamba seperti ini tidak dapat diperintah oleh orang yang tidak mempunyai hubungan dengan kerajaan. Sedangkan *ata arung* ialah hamba yang senantiasa mendampingi raja apabila ia keluar atau bepergian. Orang seperti itu biasanya dikenal dengan sebutan *Pallapi' baro-barona arungE*, artinya pelindung bagi keamanan.
 - c) *Ata Tai manuk*, yaitu golongan hamba sahaya yang secara turun temurun telah menjadi ata. Mereka ini sering disebut *atanna ataE*, artinya hamba dari hamba.

Dahulu pelapisan sosial seperti itu menjadi sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat Bugis, akan tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi mendominasi, dan timbul kecenderungan masyarakat untuk menggolong-golongkan kelompok sosial sesuai dengan posisi dan status seseorang dalam kehidupan sosial-ekonomi dan pemerintahan. Dalam hal itu masyarakat dibagi dalam golongan-golongan *anakarung* yang menduduki jabatan dalam pemerintahan negeri; *To panrita*, yaitu golongan alim ulama yang mempunyai pemahaman dan ilmu yang luas tentang agama; *golongan to sugik* (orang kaya-kaya); golongan pegawai dan cendekiawan; golongan *pallau ruma* dan *pakkaja*, yakni petani dan nelayan; dan golongan buruh kasar.

Demikian, tampak adanya pergeseran-pergeseran dalam status sosial seseorang, hal mana merupakan salah satu gejala perubahan sosial dan budaya masyarakat di Bugis.

2. Kehidupan dengan Berbagai Ritus.

Dalam kehidupan orang-orang Toraja dan Bugis kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai macam ritus. Di kalangan masyarakat Toraja ritus-ritus itu berhubungan erat dengan kepercayaan tradisional yang disebut *Aluk Todolo*.

Ritus dalam arti upacara di dalam Aluk Todolo sangat erat hubungannya dengan sistem stratifikasi sosial di Tana Toraja. Semua ritus yang ada di Tana Toraja (*Aluk Todolo*) dapat dilakukan oleh setiap orang Toraja. Pembatasan-pembatasan tetap ada sesuai derajat sosial seseorang yang ditentukan dalam sistem pelapisan masyarakatnya. Upacara dalam masyarakat Toraja dibedakan atas dua jenis, yaitu : (1) upacara yang berhubungan dengan arwah; dan (2) jenis upacara yang berhubungan dengan *Puang Matua* atau dewata.

Upacara yang berhubungan dengan pemujaan kepada arwah, umumnya dianggap sebagai upacara perkabungan, sedangkan upacara pemujaan kepada Puang Matua merupakan upacara kesukaan dan syukur. Apabila dilakukan upacara kematian, maka selama itu tidak boleh dilakukan upacara yang berhubungan Puang Matua.

Upacara yang berhubungan dengan Puang Matua disebut *Rambu Tuka*, dilakukan untuk menghadap Puang Matua dengan tujuan :

- a. Memohon berkat kepada Puang Matua dalam hal-hal seperti perkawinan, kelahiran anak, kesembuhan dari penyakit, perlindungan dalam pertumbuhan hidup manusia, dan sebagainya.
- b. Mengucap syukur atas suatu karunia yang telah diperoleh seseorang dari puang matua, misalnya panen yang membawa hasil memuaskan, selesai membangun *tongkonan*, atau pun dalam berbagai usaha.

Upacara yang berhubungan dengan arwah disebut *Rambu Solo*. Upacara pemakaman mayat merupakan upacara terpenting di dalam *Aluk Rampe Katampu (Rambu Solo)* yang biasanya tidak akan dilewatkan begitu saja oleh seorang yang berdarah Toraja. Mereka percaya bahwa diterima atau tidaknya atau bahagia tidaknya seseorang di *puyo* adalah sebagian besar tergantung kepada upacara pemakaman orang yang mati itu. Segala sesuatu yang dikorbankan di dalam upacara kematian akan ikut serta dibawanya

ke dalam alam baru itu. Semuanya itu akan menjadi harta kekayaan di puyo. Karenanya makin banyak hewan yang dikorbankan, makin senang hidupnya nanti di puyo.

Tingkat kedudukan orang yang meninggal menentukan besar-kecilnya upacara pemakaman. Makin tinggi lapisan sosial seseorang, makin besar dan ramai pula upacara pemakamannya. Upacara seperti ini hampir seluruhnya diselenggarakan oleh *To Minaa* yang ahli di bidang adat istiadat.

Adapun kehidupan ritus dalam masyarakat Bugis baik di Wajo maupun di Bulukumba, tampaknya yang masih berlangsung dewasa ini terbatas pada soal-soal upacara daur hidup (*life cycle*), yakni mulai dari kelahiran sampai kepada pemakaman atau upacara kematian, di samping juga masih ditemukan adanya kebiasaan upacara panen yang disebut *manre sipulung*.

Dalam hal upacara peralihan atau *life cycle*, meliputi upacara-upacara :

- a. *Upacara kelahiran*, di mana upacaranya bermula pada saat si jabang bayi masih berada di dalam kandungan ibunya. Pada waktu tertentu, setelah umur kandungan berkisar 1 – 2 bulan, kepada ibu yang sedang hamil diadakan upacara *mappanre to mangideng*, artinya memberi makan kepada orang ngidam. Proses selanjutnya diadakan upacara kelahiran manakala sang bayi sudah lahir dan berusia tujuh hari setelah kelahiran. Dalam pada itu diadakan upacara pembacaan Barzanji yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang mengerti dan paham tentang seluk-beluk ajaran agama Islam. Pada waktu yang lampau upacara kelahiran selalu diadakan secara besar-besaran dan seramai mungkin, tetapi sekarang sudah banyak disederhanakan pelaksanaannya.
- b. *Upacara perkawinan*, upacara perkawinan biasanya dilaksanakan lebih ramai dari upacara kelahiran. Upacara ini meliputi tahap-tahap pelamaran, penyerahan uang belanja/mas-kawin dan akad nikah yang diselenggarakan secara Islam bagi mereka yang beragama Islam.
- c. *Upacara kematian*, meliputi upacara *mattampung* (perbaikan nisan) dilaksanakan sesudah 40 hari dari hari kematian. Se-

sudah itu disusul dengan berbagai macam pembacaan sesajian pada hari-hari ke-3, ke-7, 40, 100 hari dari kematian seseorang. Semuanya itu diselenggarakan dalam keadaan sakral, oleh orang tertentu pula

Selanjutnya mengenai upacara panen, disebut *manre sipulung*, diselenggarakan oleh masyarakat Bugis umumnya dalam mengucapkan syukur atas panen yang telah diperoleh. Upacara ini disertai dengan makan bersama dalam keadaan duduk dalam bentuk lingkaran, dalam bahasa Bugis disebut *sipulung* (berkumpul).

3. Gotong Royong

Salah satu aspek sosial budaya yang perlu dikemukakan di sini ialah kebiasaan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, baik di Tana Toraja maupun di daerah-daerah yang dihuni oleh orang Bugis. Sifat kegotong royongan tersebut sampai saat ini masih tetap dipelihara oleh masyarakat, bukan hanya dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga dan masyarakat tetapi juga dalam kaitannya dengan usaha kegiatan pembangunan masyarakat desa.

Demikian kegiatan gotong royong ditemukan dalam hal pembangunan rumah, pengolahan pertanian, penyelenggaraan upacara dan ritus, bahkan juga dalam menyelenggarakan kerja bakti untuk menyelenggarakan pembuatan tanggul pertanian, pembangunan prasarana jalan, rumah-rumah ibadat dan lain sebagainya yang menyangkut bidang-bidang kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini berarti bahwa tingkat kegotong-royongan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di desa-desa sampel adalah pada dasarnya tetap merupakan salah satu faktor penopang bagi pemerintah desa di dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di desa.

B A B III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. LANDASAN PELAKSANAANNYA

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan bahwa untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi, perlu diusahakan keselarasan, antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Sejalan dengan itu, dalam Pelita II di samping meningkatkan usaha pembangunan masing-masing sektor yang berlangsung di beberapa daerah, harus pula dilanjutkan dan atau ditingkatkan pembangunan daerah yang mencakup berbagai sektor penghidupan. Selain itu, supaya usaha pembangunan yang berlangsung dalam tiap daerah sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah tersebut. Hal ini berarti, bahwa peningkatan pembangunan akan diusahakan secara lain dengan memberi bantuan rangsangan (*stimulans*), untuk meningkatkan pembangunan daerah-daerah yang relatif lebih terkebelakang. Salah satu usaha ialah dengan memberikan sorotan khusus terhadap pembangunan daerah minus.

Kecuali itu, program bantuan pembangunan kepada daerah yang sudah mulai sejak Pelita I, dilanjutkan dan ditingkatkan dalam Pelita II. Kebijakan itu telah merupakan salah satu langkah pelaksanaan dari usaha untuk meratakan pembahagian kembali hasil pembangunan yang berupa penyebaran yang lebih merata ke seluruh daerah. Hal itu berarti pula merangsang partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara lebih meluas dalam pertumbuhan dan proses pembangunan. Dalam pada itu, adanya kerja sama secara mantap dalam pengolahan pembangunan daerah antara propinsi yang bertetangga, akan dapat mengembangkan pertumbuhan yang kuat dan yang terdapat dalam lingkungan sesuatu propinsi lain, dapat mendorong perkembangan propinsi lainnya yang relatif terkebelakang.

Dalam meningkatkan pembangunan daerah, diperlukan adanya peningkatan prakarsa dan partisipasi aktif. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan daerah maka perlu usaha peningkatan

pendapatan daerah, baik dengan pemungutan intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru. Dalam kaitan itu, peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan yang mutlak. Demikian, potensi dan aspirasi yang terdapat pada masyarakat dapat dituangkan dalam rencana operasional secara mantap, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hubungan itu, Pembangunan Masyarakat Desa adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional Indonesia. Berbicara tentang Pembangunan Masyarakat Desa, maka sesungguhnya kita secara langsung telah melibatkan diri dalam suatu istilah yang paling banyak diucapkan, ditulis dan dibicarakan dalam berbagai macam forum. Hal itu tidak diherankan, oleh karena fokus pikiran, perhatian, usaha dan energi seluruh bangsa Indonesia sedang ditujukan kepada pemecahan masalah pembangunan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelita untuk mensukseskan era pembangunan duapuluh lima tahun.

Pengertian pembangunan selalu dihubungkan dengan aktifitas manusia, kegiatan manusia dalam interrelasi dan interaksi hidup bermasyarakat untuk mencapai kemajuan atau peningkatan hidup, baik dalam arti fisik material maupun spiritual atau pembangunan rohaniah. Istilah pembangunan adalah konsep sosial politik ideologi yang berarti melaksanakan pembangunan bukan sekedar atau asal membangun saja, melainkan merupakan suatu tuntutan terlaksananya rencana pembangunan bagaimana menggerakkan manusia dengan potensi alamnya untuk mencapai peningkatan terhadap apa yang mau dibangun. Dalam menggambarkan pikiran ideal untuk mencapai suatu *image* harapan atau jika dirangkaikan dengan istilah ekonomi, biasa dirumuskan sebagai pembangunan perekonomian yang ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yakni penduduk, sumber alam, pembentukan modal, *skill* dan teknologi.

Suatu pembangunan tidak mungkin akan berjalan dengan lancar apabila tidak mendapat tunjangan dari faktor-faktor ekonomi. Hal itu dapat dimengerti oleh semua pihak seperti kenyataannya. Pembangunan adalah konsep sosial politik, ekonomi yang mengharuskan pengarah-pengarah jalannya pembangunan yang fundamental, yaitu pengamanan-pengamanan pelaksanaannya. Dalam kaitan inilah letaknya peranan pembangunan sosial politik yang pada hakekat-

nya adalah sesuatu kegiatan organisasi yang secara operasional inteligen terhadap pembangunan, personal, informasi, material atau semua aparat yang bergerak sesuai dengan penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia pada suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Bertolak dari uraian-uraian di atas tadi dapat diketahui, bahwa pengertian pembangunan itu adalah terbinanya ketahanan nasional dalam segala bidang kehidupan, sehingga dapat membawa bagi kelangsungan peningkatan pembangunan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan usaha pembangunan itu, maka daerah pedesaan merupakan salah satu faktor penunjang dan penopang bagi terciptanya suasana kehidupan yang diinginkan. Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa wilayah negara Republik Indonesia terdiri atas kurang lebih 13.667 pulau, serta 58.164 desa yang didiami oleh 81% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia (Direktorat PMD Propinsi Sulawesi Selatan). Demikian, penduduk yang berdiam di kota-kota hanya berkisar 19% dan dengan demikian, tidak tepatlah apabila jumlah yang relatif amat kecil itu dijadikan ukuran di dalam menentukan tingkat kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai selama Pelita.

Di samping faktor wilayah dan kependudukan di atas maka pada kenyataannya desa dan masyarakatnya memegang andil yang sangat besar dalam masa perjuangan fisik, baik sebagai tempat pertahanan terakhir maupun sebagai tempat mengatur strategi untuk menyerang lawan. Desalah tempat lahirnya para pejuang kemerdekaan dan di desa pulalah gugurnya para pahlawan revolusi dalam usahanya mengusir kaum penjajah dari seluruh daratan tanah air.

Jelaslah bahwa desa dan masyarakatnya merupakan landasan dan kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang pada zaman silam masyarakatnya senantiasa menjadi sasaran setiap bentuk kekacauan dari pemberontak, baik oleh Kartosuwiryo di pulau Jawa, Permesta dan DI/TII di Sulawesi maupun oleh tindakan yang tak bertanggung jawab dari penghianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa pemerintahan Orde Lama pada zamannya. Segala bentuk kekacauan tersebut bagaimana pun juga telah mengakibatkan ke-

melaratan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila masalah pedesaan itu diberikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, demi terciptanya kesejahteraan yang merata bagi segenap rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hubungan itu Departemen Dalam Negeri cq Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa telah menggariskan *policy* dan program pembangunan masyarakat desa dengan BAPPENAS sebagai suatu pola pembangunan nasional di bidang pembangunan desa. Dalam hal itu, pembangunan desa merupakan suatu usaha pembangunan nasional yang dilaksanakan di pedesaan atas dasar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada pelaksanaan pembangunan desa-desa sampel di Sulawesi Selatan, untuk itu terlebih dahulu akan dikemukakan landasan-landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Menurut hasil penelitian, landasan-landasan penyelenggaraan pembangunan di desa-desa sampel dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah".
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang "Pemerintahan Desa".
3. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1969 tentang "Pengendalian Operasional Pembangunan Lima Tahun Khususnya yang menyangkut sektor (K) Pembangunan Desa".
4. Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1981 tentang "Lembaga Sosial Desa (LSD).
5. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang "Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa" menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa".
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1980 tentang "Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa".
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 Tahun 1980 tentang "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat Desa".
8. Keputusan DPRD No. 28/SP/DPRD/74 tanggal 5 Oktober 1974 tentang "Pencabutan Surat Keputusan No. 60/DPRD/72

tanggal 18 September 1972”.

9. Dan mengubah tarif untuk keseragaman pungutan dana-dana di tiap-tiap desa dalam kabupaten Tana Toraja.
10. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja No. 187/SP/74 tanggal 5 Desember 1974 tentang "Pemberlakuan Keputusan DPRD Tana Toraja tanggal 5 Oktober 1974 No. 28/SP/DPRD/74 tentang keseragaman pungutan dana untuk pembangunan masyarakat desa/LSD di tiap-tiap desa dalam Daerah Tingkat II Tana Toraja dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1971”.
11. Surat Keputusan BKDH Tingkat II Tana Toraja No. 85/SP/77 tentang "Penghapusan Struktur Kepala Kampung dalam Kabupaten Dati II Tana Toraja”.
12. Keputusan DPRD No. 8/SK/DPRD/1979 tentang pencabutan kembali surat keputusan DPRD No. 28/SP/DPRD/1974 tanggal 5 Oktober.

Bertolak dari pada landasan-landasan hukum pelaksanaan pembangunan desa seperti tersebut di atas ini, maka jelas bahwa arah perencanaan dan penyelenggaraannya memerlukan penanganan yang serius dan mantap dari pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah desa dimaksudkan sebagai "pejabat pemerintahan tingkat desa bersama dengan perangkatnya”. Sedangkan pemerintah desa itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Bab II Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3), terdiri atas :

Kepala Desa

Lembaga Musyawarah Desa

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa pembangunan pedesaan dilaksanakan atas dasar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri, maka tujuan dari pembangunan desa adalah untuk mempertumbuhkan swadaya masyarakat untuk dapat mempertinggi taraf hidup secara integral spiritual dan material, sedangkan tujuannya ialah untuk pencapaian tujuan

umum yang meliputi sarana-sarana keimanan, kesehatan jasmaniah, kesehatan rohaniah, keamanan, kepandaian dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Pembangunan dengan demikian, mempunyai tujuan yang secara umum diharapkan mempertinggi taraf hidup secara integral baik dalam arti fisik material maupun spiritual, dengan tujuan khusus meliputi sarana-sarana yang dikenal, sebagai 5K seperti telah disebutkan di atas tadi. Jikalau pengertian ini dihubungkan dengan tujuan umum pembangunan nasional, dengan sendirinya pembangunan desa pada hakekatnya adalah usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi kehidupan warga masyarakat desa itu sendiri.

Dalam perjuangan mencapai kesejahteraan lahir dan batin itu, diperlukan adanya suatu peningkatan dalam sikap hidup dari masyarakat desa, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Transformasi dari masyarakat, memerlukan perubahan sikap dan pandangan, perubahan nilai-nilai atau *value system* dari yang tadinya berlaku. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa semua nilai-nilai tradisional sekaligus harus ditinggalkan, melainkan hendaklah diadakan semacam penyaringan untuk memilih mana-mana di antaranya yang sesuai dan dapat memperlancar arus pembangunan, sedapat mungkin dipelihara dan dibina. Adapun yang merupakan penghambat, seharusnya ditinggalkan saja.

Setelah mengemukakan sekedar landasan pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat pedesaan termasuk di desa-desa sampel dalam rangka penelitian ini, maka pembahasan selanjutnya dititik beratkan pada proses pelaksanaan pembangunan desa di bidang pemerintahan desa.

B. PELAKSANAAN DI DAERAH

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, disebutkan, antara lain bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa, ialah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam penjelasan

Undang-Undang seperti dicantumkan di atas ini, maka Pemerintahan Desa dalam kaitannya dengan pembangunan desa tak lain daripada usaha penyelenggaraan tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga warga masyarakat dapat turut menikmati kehadirannya sebagai manusia pribadi, suatu eksistensi individual dalam wadah negara Pancasila yang adil dan makmur.

Betapa pentingnya pembangunan bidang pemerintahan desa di seluruh tanah air, telah ditandaskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No. IV/MPR/1978 bahwa GBHN itu sendiri bertujuan tidak saja mengadakan tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia, guna mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan itu dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Dari kandungan isi dan pengertian Garis-Garis Besar Haluan Negara seperti tercantum di atas ini, semakin jelaslah bahwa tujuan pemerintahan desa dalam kaitan dengan pembangunan bidang pemerintahan di desa, adalah :

1. Memperkuat pemerintah desa;
2. Menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan; dan
3. Menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Dalam rangka realisasi GBHN tersebut, dimantapkanlah pokok-pokok pemerintahan di daerah melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974, di dalam mana ditandaskan pada Bab V tentang "Pemerintahan Desa" [pasal 88] yang berbunyi "Peraturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang". Mengenai Undang-Undang tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan terdahulu dalam laporan ini. Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor

5 tentang Pemerintahan Desa I Umum ayat (4) dinyatakan, bahwa Undang-Undang tersebut mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintah desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah masyarakat yang disebut "Lembaga Musyawarah Desa".

Sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pembangunan Desa yang dikehendaki dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa itu, Pemerintah Desa dalam praktek operasionalnya senantiasa dibantu oleh Lembaga Musyawarah Desa. Dalam hubungan itu, Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa mempunyai kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Selain itu Kepala Desa mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Demikian, pembangunan di bidang pemerintahan pada desa-desa sampel (lokasi penelitian), biasanya berlangsung dalam keadaan sinkron dan relevan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa di tempat-tempat tersebut menyelenggarakan kebijakan pembangunan atas hasil permufakatan yang digodok dan dirumuskan melalui Lembaga Musyawarah Desa.

Menurut hasil penelitian di desa-desa sampel perjuangan pertama yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelita pertama yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelita di tiap-tiap desa, adalah memfungsikan Lembaga Permusyawaratan Desa tersebut. Di samping itu, pengadaan berbagai sarana pemerintahan termasuk administrasi serta perangkat desa yang sesuai telah diusahakan semaksimal mungkin. Seberapa jauh keberhasilan pembangunan desa di bidang pemerintahan, akan diungkapkan dalam Sub bab III C berikut ini.

C. HASIL YANG DIPEROLEH

Sesuai dengan hasil penelitian, maka hasil pembangunan yang sempat dicapai selama Pelita di desa sampel, adalah sebagai berikut :

1. Pangli Palawa

Hasil Pelita yang dicapai dalam pembangunan di bidang pemerintahan desa, khususnya di Desa Pangli Palawa dapat diperinci sebagai berikut :

a. Pelita I

Tahun Anggaran	Jenis Proyek	Sumber Biaya	
		Swadaya	Bant. Pusat
1969 / 1970	Pembakaran batu merah	100.000,-	100.000,-
1970 / 1971	Pengairan sawah Koa	100.000,-	100.000,-
1971 / 1972	sda.	—	100.000,-
1972 / 1973	Kios Pupuk Ran	300.000,-	100.000,-
1973 / 1974	Los Pasar	500.000,-	100.000,-
	Sumur Umum	200.000,-	1.000.000,-
Jumlah		1.200.000,-	1.500.000,-

b. Pelita II

Tahun Anggaran	Jenis Proyek	Sumber Biaya	
		Swadaya	Bant. Pusat
1974 / 1975	Kantor Desa	2.250.000,-	200.000,-
1975 / 1976	Jembatan	464.000,-	300.000,-
1976 / 1977	D e k e r	450.000,-	300.000,-
1977 / 1978	Pipa air	400.000,-	350.000,-
1978 / 1979	Pipa air	700.000,-	350.000,-
1979 / 1980	Deker jalan	300.000,-	750.000,-
Jumlah		4.564.000,-	2.250.000,-

Sumber data : Potensi Desa Pangli Palawa

2. Sesean Suloara

Hasil pembangunan yang dicapai di desa ini selama Pelita, adalah :

Pelita	Jenis Proyek	Sumber Biaya	
		Swadaya	Pusat
I	Peternakan	200.000,-	100.000,-
	Los Pasar	100.000,-	100.000,-
II	Kios pupuk	200.000,-	300.000,-
	Pipa air	300.000,-	300.000,-
	Pipa air	300.000,-	300.000,-
	Kantor Desa	—	350.000,-
	Pipa air	—	350.000,-
Jumlah biaya		1.100.000,-	2.900.000,-

Sumber data : Papan potensi desa Sesean Suloara.

3. Sadan Matallo

Untuk Desa Sadan Matallo, hasil pembangunan yang dicapai selama Pelita adalah sebagai berikut :

Pelita	Jenis Proyek	Sumber Biaya	
		Swadaya	Pusat
I	Satu jembatan	100.000,-	1.349.500,-
	Los pasar	830.000,-	100.000,-
	Pengairan	—	—
	Pasar Takaran	—	—
	Campuran	125.000,-	100.000,-

1	2	3	4
II	Kantor desa	200.000,-	1.200.000,-
	Sumur umum	700.000,-	300.000,-
	Kios pupuk	300.000,-	190.000,-
	Sumur umum	350.000,-	225.000,-
	Sumur umum	350.000,-	400.000,-
Jumlah		2.955.000,-	2.515.000,-

4. Sompe

Hasil pembangunan di Desa Sompe selama Pelita adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan/perlengkapan administrasi
- b. Pengangkatan aparat pemerintahan desa, dalam hal ini telah berhasil diangkat beberapa orang Kepala Desa beserta dengan Kepala-Kepala Kampung/lingkungan dan Ketua-ketua RK maupun Ketua RT.
- c. Pengangkatan perangkat desa, dalam hal ini telah dibentuk/diangkat perangkat desa yang terdiri dari satu orang sekretaris serta beberapa orang Kepala urusan.
- d. Pembentukan LKMD, untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pedesaan serta mensukseskan jalannya pembangunan.
- e. Swakarya pertama, dalam Pelita telah berhasil ditunjuk sebagai desa Swakarya pertama untuk ikut di dalam perlombaan desa Desa/Kesinambungan tingkat Propinsi. Dalam pada itu, desa Sompe berhasil keluar sebagai pemenang juara I (untuk tingkat Propinsi Sulawesi Selatan).

5. Anabanua.

Sebagaimana halnya dengan desa-desa lainnya, maka Desa Anabanua telah memperoleh hasil dari kegiatan pembangunan desa di bidang pemerintahan, sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi desa;
- b. Pengangkatan aparat desa;
- c. Pengangkatan perangkat desa; dan
- d. Pembentukan LKMD.

6. Tancung .

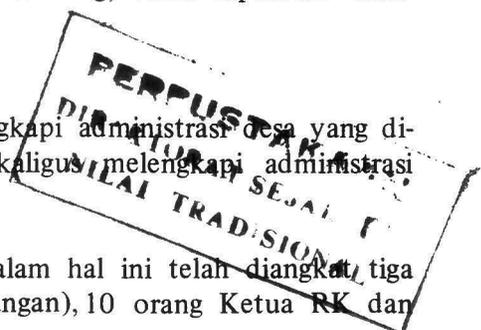
Hasil-hasil Pelita yang telah dicapai desa ini, antara lain :

- a. Melengkapi administrasi desa;
- b. Mengangkat aparat desa;
- c. Mengangkat perangkat desa; dan
- c. Membentuk LKMD
- e. Mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan.
- f. Dalam bidang sosial, telah dibina :
 - 1) pendidikan
 - 2) kesehatan
 - 3) kebudayaan
 - 4) kesejahteraan keluarga
 - 5) pembinaan agama
- g. Dalam bidang sarana :
 - 1) sarana angkutan
 - 2) sarana komunikasi
 - 3) sarana produksi
 - 4) sarana pemasaran
 - 5) sarana perumahan rakyat
 - 6) sarana olah raga

7. Gattareng

Dalam pembangunan Desa Gattareng, telah diperoleh hasil-hasil berupa :

- a. Administrasi :
 Dalam bidang ini telah dilengkapi administrasi desa yang dipusatkan di Balai Desa, sekaligus melengkapi administrasi lingkungan, RK dan RT.
- b. Pengangkatan aparat desa, dalam hal ini telah diangkat tiga orang Kepala Dusun (Lingkungan), 10 orang Ketua RK dan



30 orang Ketua RT.

- c. Pengangkatan Perangkat Desa, dalam hal ini telah diangkat perangkat desa, yaitu :
- Sekretaris desa;
 - Kepala Urusan Pemerintahan Keamanan;
 - Kepala Urusan Keuangan;
 - Kepala Urusan Pembangunan;
 - Kepala Urusan Kesra;

Pengangkatan perangkat desa seperti tercantum di atas ini, adalah untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Desa.

Membentuk LKMD, sebagai suatu wadah yang formal di desa, bertugas untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan desa. Anggotanya, diambil dari kalangan anggota masyarakat setempat, berasal dari berbagai unsur yang ada.

8. D a m p a n g

Dalam pembangunan selama Pelita, telah dicapai hasil-hasil berupa :

- a. Perlengkapan administrasi yang berpusat di Balai Desa, di samping itu telah berhasil dilengkapi administrasi Lingkungan, RK dan RT.
- b. Pengangkatan aparat desa
Untuk melengkapi aparat desa, dalam rangka menjalankan roda-roda pemerintahan, telah diangkat tiga orang Kepala Lingkungan, masing-masing :
- 1) Kepala Lingkungan Barombong;
 - 2) Kepala Lingkungan CampadidiE;
 - 3) Kepala Lingkungan Bonto Bulaeng.
- Di samping itu, telah diangkat :
- 10 orang Ketua RK; dan
 - 30 orang Ketua RT.
- c. Pengangkatan Perangkat Desa, dalam hubungan itu pengangkat-

an perangkat Desa meliputi :

- Sekretaris desa seorang;
- Kepala urusan empat orang.

d. Pembentukan LMD (Lembaga Musyawarah Desa).

Lembaga Musyawarah Desa sebagai wadah orang-orang yang ada dalam desa diharapkan dapat memberikan nasihat/pertimbangan kepada Kepala Desa di dalam menjalankan roda pemerintahan.

e. Pembentukan LKMD.

9. Matekko

Dalam menjalankan pembangunan di bidang pemerintahan desa di Matekko, telah diperoleh hasil berupa :

- a. Pengadaan/perengkapan administrasi desa, serta administrasi RK/RT.
- b. Pengangkatan aparat desa, sebanyak :
 - Kepala Lingkungan empat orang;
 - Kepala RK 14 orang; dan
 - Ketua RT sebanyak 28 orang.
- c. Pengangkatan perangkat desa yang terdiri atas :
 - Sekretaris desa sebanyak seorang; dan
 - Kepala Urusan Pemerintahan sebanyak lima orang.
- d. Pembentukan LMD (Lembaga Musyawarah Desa) sebagai pengganti BAMUDES di tingkat Kelurahan yang merupakan satu-satunya wadah bagi kelurahan untuk memperoleh dana pembangunan dari masyarakat atas persetujuan Bupati.

Demikianlah beberapa hasil yang telah dicapai Pelita dalam pembangunan di bidang pemerintahan, khususnya di desa-desa sampel yang menjadi lokasi penelitian ini. Tampak dengan jelas, bahwa setelah adanya Pelita maka terdapat berbagai macam peningkatan dalam kehidupan masyarakat, baik di bidang fisik material maupun di bidang kesejahteraan sosial. Peningkatan dalam berbagai bidang terutama aspek pemerintahan desa sebagaimana diuraikan di atas tadi, maka dengan sendirinya akan membawa implikasi dan pengaruh

terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya pada desa-desa bersangkutan. Seberapa jauh pengaruh pembangunan bidang pemerintahan tersebut, bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan, dapat dilihat dalam bab IV berikut ini.

B A B IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Usaha menyebarluaskan pembangunan sampai ke desa-desa, maka sejak tahun 1969/1970 telah diberikan bantuan pembangunan kepada desa. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat desa dalam membangun desanya, agar pada suatu waktu desa menjadi dan seterusnya menjadi landasan bagi pembangunan sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Bantuan kepada desa-desa itu, dimaksudkan untuk pembangunan prasarana desa yang amat dibutuhkan, meliputi prasarana produksi, seperti bangunan-bangunan yang diperlukan dalam peningkatan produksi; prasarana industri, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran hasil produksi dan lain sebagainya.

Konsep tentang pembangunan desa, ialah desa itu sendiri membuat rencana pembangunan desanya, kemudian dia sendiri melaksanakannya, hal ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, oleh karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini, ialah memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan. Poryek-proyek bantuan desa direncanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa (LSD), serta pemuka masyarakat. Proyek yang telah direncanakan itu dibicarakan dalam musyawarah desa guna disetujui bersama. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan, ialah jumlah dan jenis proyek, serta berapa jumlah bantuan swadaya masyarakat. Rencana yang telah disetujui bersama itu dijabarkan dalam Daftar Usulan Rencana Proyek untuk dimajukan kepada Bupati melalui Camat. Apabila rencana tersebut telah disetujui oleh Bupati bersama-sama atau telah disetujui oleh Ditjen Pembangunan Desa, maka Kepala desa mendapatkan bantuan yang dibayarkan lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau bank yang telah ditunjuk.

Pelaksanaan proyek bantuan desa, Kepala desa dibantu oleh LSD melaksanakan proyek yang telah memperoleh bantuan tersebut. Bilamana proyek telah selesai, maka Kepala desa melaporkan dan membuat berita acara penyelesaian proyek. Laporan ini di-

sampaikan kepada Bupati. Demikian kenyataan proses bantuan kepada desa. Bantuan pembangunan desa tersebut, semata-mata dimaksudkan untuk memancing gairah rakyat membangun, agar supaya dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan itu, apalagi bila telah berhasil memancing swadaya gotong-royong, hal itu berarti akan terjadi perubahan-perubahan yang menyangkut segi-segi kehidupan masyarakat atas pengaruh pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut. Berhubung karena luasnya pengaruh Pelita di daerah pedesaan, maka uraian di bawah ini akan dibatasi hanya yang menyangkut tentang Pemerintahan Desa.

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu struktur terdapat sistem-sistem. Dalam hubungan ini, sistem pemerintahan bersama pejabat-pejabat yang menjalankan sistem itu, berperan dalam mengubah serta mempengaruhi orang-orang yang dikenai sistem atau mempengaruhi jalannya sistem itu sendiri. Struktur pemerintahan berjalan atas kelancaran administrasi pemerintahan. Peranan administrasi pemerintahan dapat dianggap sebagai *steel frame* atau tulang punggung pemerintah. Administrasi pemerintahan, para pejabat dan petugas menjalin diri pada pembagian tugas dan cara-cara melakukan tugas. Peranan yang dilakukan oleh petugas merupakan *input* non-materi terhadap pembangunan. Dengan demikian, petugas pemerintah mempunyai tugas yang akan menentukan dan mempengaruhi jalannya dan berubahnya sistem sosial dan sistem budaya guna memantapkan tahap-tahap pembangunan berikutnya. Walaupun beberapa petugas sering kurang menyadari peranannya serta pengaruhnya, sampai eselon terendah pun berperanan sebagai penghubung langsung kepada rakyat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Turner dan Holt (1966; 11) setelah melihat, bahwa dalam setiap sistem itu terdapat unsur-unsur yang potensial, yang disebutnya : a. peranan (*role*), dan b. harapan terhadap peranan yang harus dilaksanakan (*expected role*) sehubungan dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Setiap tindakan pejabat dalam menjalankan sistem pemerintahan, mempengaruhi sistem sosial dan sistem budaya di desa. Situasi pengaruh-mempengaruhi itu, oleh Talcot

Parsons (1957 : 18) disebutnya "fungsi", yaitu fungsi dari para pejabat pengendali administrasi pemerintahan.

Dikatakan pula oleh T. Parson, bahwa dalam sistem sosial terdapat empat syarat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu : a. *adaptation* (adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan), b. *goal attainment* (pencapaian tujuan), c. *Pattern maintenance and tension management* (menentukan pola terlebih dahulu atau nilai pribadi pejabat sendiri yang merupakan pola baginya), d. *integration* (nilai-nilai dengan sistem sosial serta sistem budaya yang berlaku setempat). Dengan demikian, seorang pejabat perlu mendamaikan semua faktor yang *interdependent* sesudah mengadakan *adaptation* dan integrasi peranan-peranan serta masalah, sehingga memunculkan bentuk *role-relationship* yang mengarah pada partisipasi sukarela. Tanpa memperhatikan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya, akan sulit untuk memperoleh *role-relationship* atau pun partisipasi sukarela. Struktur pemerintahan akan berpengaruh, banyak ditentukan oleh pejabat-pejabat atau petugas yang membenahi dalam sistem pemerintahan tersebut. Sistem dan sub-sistem dalam pemerintahan merupakan suatu hubungan kukuh dan kesatuan bulat, barulah merupakan suatu struktur.

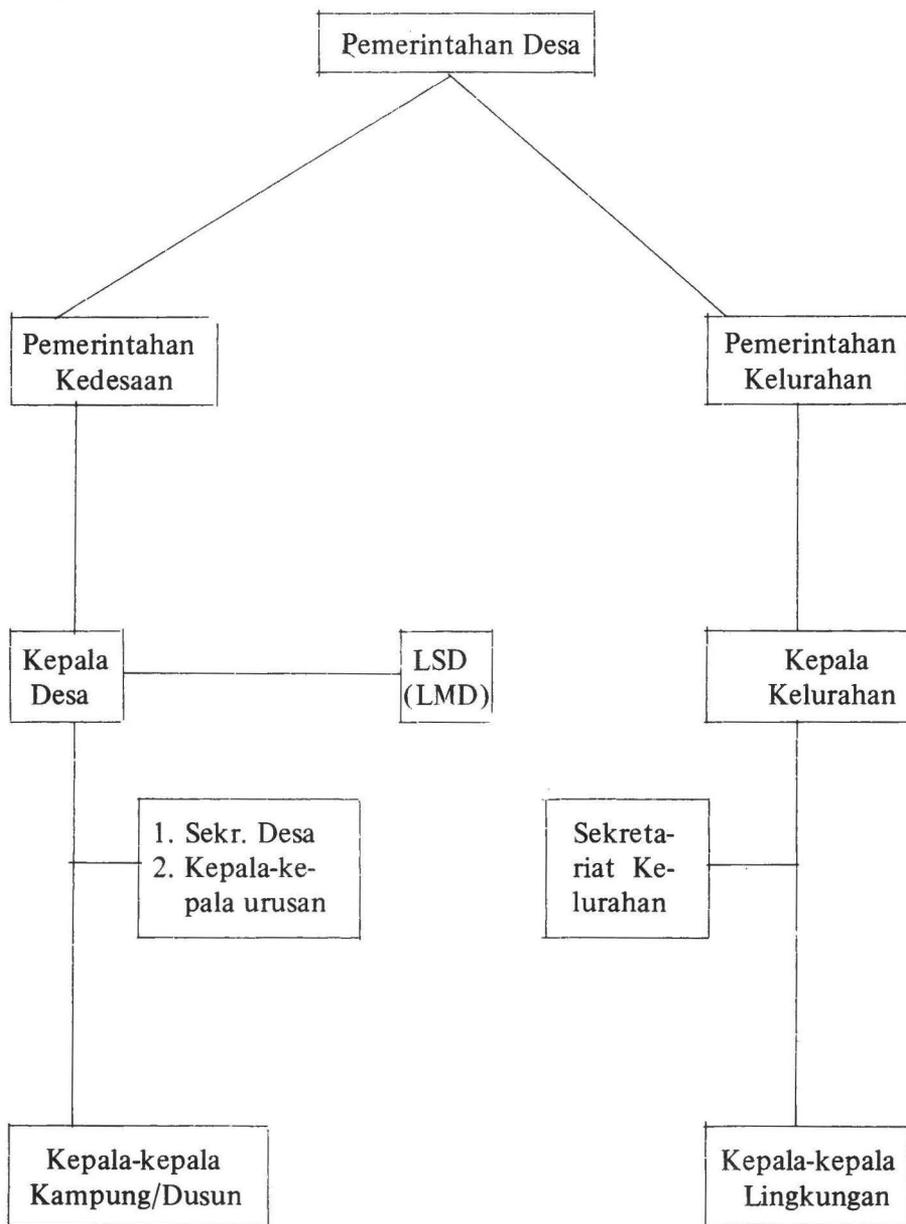
Kenyataan-kenyataan menunjukkan dalam penelitian pada sembilan buah desa sampel di Sulawesi Selatan, terdiri atas dua pola, yaitu a. pola pemerintahan desa dan b. pola pemerintahan kelurahan. (lihat skema struktur pemerintahan desa). Pemerintahan kelurahan baru saja diadakan di Sulawesi Selatan, yaitu dalam tahun 1979, sedang pola pemerintahan desa, sejak pemugaran desa-desa di Sulawesi Selatan dalam tahun 1962. Sebelum tahun 1962, istilah struktur yang digunakan adalah distrik untuk kecamatan, *wanua* atau *kampong* untuk desa di daerah-daerah Bugis, sedang di daerah-daerah Makassar digunakan istilah *bori* dan *kampong*. Di daerah Tana Toraja untuk desa digunakan istilah *lembang*. Pada tahun 1962, yaitu masa pemugaran desa-desa, istilah-istilah bahasa daerah sebagiannya masih digunakan untuk desa dan hanya distrik diganti menjadi kecamatan. Lambat laun dalam tahun-tahun berikutnya, semua istilah bahasa daerah bagi desa, diubah menjadi istilah *desa* dan sebagiannya lagi menggunakan istilah *kampung* atau lingkungan. Perubahan-perubahan itu dilandasi oleh pemikiran ialah untuk menyeragamkan struktur dan

administrasi pemerintahan demi kelancaran tugas-tugas pembangunan. Kerjasama ini pula dimaksudkan agar lebih mudah membuat rencana pembangunan. Akibat dari keseragaman ini, maka para petugas desa menjadi bertambah pengetahuannya serta keterampilannya membuat rencana dan makin trampil melaksanakan proyek pembangunan.

Di antara sembilan buah desa sampel, hanya sebuah desa, yaitu Desa Matekko di Kabupaten Bulukumba yang memiliki struktur pemerintahan berbentuk kelurahan, sedang delapan buah desa lainnya masih mempunyai struktur pemerintahan kedesaan. Dua pola struktur yang berlaku di Sulawesi Selatan bagi desa-desa itu, yaitu : Struktur pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa, kemudian dibantu oleh Lembaga Sosial Desa (LSD). Lembaga ini kemudian diperbaharui menjadi Lembaga Musyawarah Desa dalam tahun 1979. Kepala Desa dibantu oleh seperangkat aparat desa yang terdiri atas : 1) Sekretaris Desa, 2) Kepala Urusan Keamanan, 3) Kepala Urusan Keuangan, 4) Kepala Urusan Pembangunan, dan 5) Kepala Urusan Kesejahteraan. Di bawah Kepala desa terdapat Kepala-kepala Kampung atau Kepala Lingkungan. Kemudian tingkat terbawah adalah Ketua-ketua Rukun Kampung (RK) bersama Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT). Pada semua desa penelitian, pada umumnya sebuah RT terdiri atas 10 sampai 20 Kepala Keluarga, sedang sebuah RK terdiri atas dua sampai empat buah RT. Sebuah Kampung atau Lingkungan rata-rata memiliki empat sampai delapan buah RK. Di atas dari Kepala Desa adalah Kepala Kecamatan, sedang di atas Kecamatan ialah Bupati atau Kepala Daerah Tingkat II. Tiga buah Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, sebuah terletak di dataran tinggi, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan dua buah terletak di dataran rendah, yaitu Kabupaten Wajo dan Bulukumba. Ketiga buah Kabupaten dapat dianggap mewakili empat suku bangsa dilihat dari segi norma-norma sosial nilai budaya, yakni Kabupaten Tana Toraja dapat mewakili suku bangsa Bugis dan Kabupaten Bulukumba dapat mewakili suku bangsa Makassar.

Pola Struktur kedua, yaitu Pemerintahan Kelurahan, terdiri atas Kepala Lurah, dibantu oleh seperangkat lurah yang disebut Sekretariat kelurahan, di mana susunannya masih mengikuti aparat desa. Di bawah dari Kepala Lurah, terdiri atas Kepala-kepala Lingkungan, sedang di bawah dari Kepala Lurah sama halnya Pemerintahan desa, yaitu RK dan RT, Struktur Pemerintahan dari kedua

SKEMA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA



pola tersebut di atas, tampak kekuasaan kepala desa telah dilimpahkan sebagiannya kepada pembantu-pembantunya, yaitu aparat desa sehingga mekanisme pemerintahan desa menjadi lebih efektif, apabila struktur ini dibandingkan dengan struktur lama sebelum Pelita.

Kerapian struktur Pemerintahan desa ini, membawa pengaruh atas mekanisme kerja dan hubungan-hubungan tugas yang efisien. Dibanding struktur pemerintahan sebelum Pelita, terlihat adanya jenjang hirarki yang harus dilalui dalam lalu lintas mekanisme administrasi pemerintahan. Jenjang-jenjang hirarki yang bersifat feodal itu, memang pada masanya mewakili aspirasi masyarakatnya, sesuai pula kehidupan desa yang serba tenang dengan segala rahasia di dalamnya. Ketenangan yang damai dirasakan suatu kebahagiaan menurut sistem budaya dengan kehidupan yang monoton.

Kembali kita melihat fungsi struktur dalam pembangunan adalah mempercepat proses pembuatan keputusan dan kebijaksanaan. Di sini dibedakan antara istilah "pemerintah" dan "administrasi pemerintahan". Pemerintah adalah proses pembuatan keputusan, sedang administrasi pemerintahan adalah proses pelaksanaan apa yang telah diputuskan itu. Pemerintah desa, ialah Kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Melalui peran yang dijalankan oleh pemerintah desa ini menurut tujuan struktur akan mengarahkan pencapaian pembangunan. Tujuan utama pembangunan di pedesaan adalah membangkitkan swadaya gotong-royong agar desa tersebut dapat berswasembada. Fungsi struktur pemerintahan desa, sebagaimana kenyataannya hanya men-sinkronkan keputusan dan kebijaksanaan dari pusat atau dari atasan desa dengan kondisi sistem sosial dan sistem budaya pedesaan. Perencanaan di desa sering tidak sesuai dengan daya pedesaan. Perencanaan di desa sering tidak sesuai dengan keperluan desa, bukan karena di desa tersebut diperlukan suatu mekanisme pengambilan keputusan yang formal lagi, melainkan perlu adanya pengetahuan dan penghayatan tugas pejabat desa dengan kondisi desa, serta komunikasi ke atas yang memungkinkan penyampaian tentang kondisi yang dihadapi dan hambatan-hambatan tugas yang dialaminya. Peranan pemerintah desa bersama aparatnya akan memancarkan pengaruh kepada anggota masyarakat. Pengaruh di antara mereka banyak juga ditentukan oleh nilai tradisional yang dipegangnya. Di samping nilai pribadi yang dianut oleh para pejabat, ditentukan pula oleh sikap mental sebagai hasil pendidikan dan pengalamannya. Ada-

kalanya pejabat terlalu berpegang pada struktur yang ketat, sehingga cara-cara menjalankan pemerintahan menjadi kaku.

Struktur pemerintahan sebagai suatu organisasi merupakan batasan-batasan tugas, agar setiap petugas tahu batas-batas tugasnya yang harus disempurnakan lagi dengan menghayati nilai-nilai yang berkembang di desanya, hanya dengan cara demikian ia akan berhasil mempengaruhi anggota masyarakat untuk turut partisipasi dalam pembangunan. Ajakan untuk partisipasi dan swadaya dari anggota masyarakat, merupakan pengaruh struktur pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat yang bijaksana.

B. CARA PEMILIHAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Aparat pemerintahan desa, dimaksudkan di sini termasuk Kepala desa, anggota pada Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat desa. Disebutkan dalam U.U.R.I. nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa Bab II Pasal 5; Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Dewan Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Kemudian, syarat-syarat lain mengenai memilih Kepala Desa diatur dengan peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Meteri Dalam Negeri. Dalam Pasal 6 Bab II ini disebutkan, Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. Pasal 7 menyebutkan pula, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Demikian bunyi U.U. tersebut di atas, jika diperiksa dalam kenyataan tentang pelaksanaannya, sebagiannya seringkali tampak tidak sesuai. Pemilihan Kepala Desa pada semua desa-desa sampel, sudah mengadakannya dua kali sejak Pelita berlangsung. Sebagian Kepala desa tetap bertahan sampai dua kali masa jabatan, seperti Kepala Desa Pangli Palawa, Desa Tancung, Desa Gattareng dan Kepala Desa Matekko. Jawaban atas pertanyaan yang dimajukan kepada informan, bahwa Kepala desa tersebut bertahan sampai dua kali masa jabatan, oleh karena memiliki dedikasi yang tinggi, di samping mereka sendiri berasal dari putra kelahiran desa tersebut

yang berasal dari keturunan baik-baik.

Cara pemilihan Kepala Desa di Sulawesi Selatan yang terlihat pada desa-desa sampel, terdapat dua pola pemilihan. Pola pertama, adalah pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia. Pola kedua, adalah pemilihan dengan penunjukan. Pola pertama terjadi pada periode PELITA I dan II, berlaku di desa-desa Gattareng, Desa Dampang dan Desa Matekko di Kabupaten Bulukumba. Demikian pula di Kabupaten Tana Toraja untuk Desa Pangli Palawa, Desa Sesean Suloara dan desa Mataallo, dalam periode Pelita ini tetap diadakan pemilihan oleh rakyat.

Pola kedua, ialah pemilihan dengan penunjukan, berlaku pada desa-desa di Kabupaten Wajo, seperti Desa Sompe, Ana'banua dan Desa Tancung, mulai adanya Pelita sampai sekarang. Berbeda halnya di Kabupaten Tana Toraja dan Bulukumba, pemilihan oleh rakyat hanya pada periode Pelita I dan II, sedang pada periode Pelita ke III, pemilihan Kepala Desa langsung penunjukan dari atas.

Menyinggung cara pemilihan Kepala Desa sebelum Pelita, senantiasa melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Rakyat diberi kesempatan memilih tiga orang calon. Pemilihan calon itu dengan memasukkan sebiji batu-batu atau biji jagung di dalam kotak yang tersedia atau cara lain seperti di Kabupaten Wajo, menulis nama calon dalam selembar amplop, kemudian dimasukkan dalam kotak yang tersedia. Jumlah biji batu-batu atau nama dalam amplop yang terbanyak, itulah yang menjadi Kepala Desa. Nama-nama calon dimajukan pada Kepala Distrik untuk mendapatkan pengesahan.

Terlukis dalam U.U. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 4 mengenai syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa, yakni :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD-45.
3. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
4. tidak pernah terlibat G.30S atau organisasi terlarang.
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
6. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan.
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun.
8. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun.

9. sehat jasmani dan rokhani.
10. sekurang-kurangnya berijazah SLP atau pengetahuan yang sederhana.

Aturan-aturan yang tersebut di atas, memang dipatuhi kemudian ditambah dengan unsur-unsur kondisi daerah sebagaimana tradisi budaya desa tersebut. Pada umumnya yang berlaku pada desa-desa sampel, faktor kebangsawanan seseorang tetap masih merupakan syarat utama, atau paling kurang merupakan latar belakang pemikiran warga desa untuk menilai buruk baik seseorang sebagai calon, di samping pemikiran apa yang terlukis dalam pasal 4 UU No. 5/1979 di atas. Seolah-olah citra masyarakat, bahwa syarat-syarat yang tersebut dalam Pasal 4 di atas berakumulasi pada citra seorang bangsawan. Seorang bangsawan dianggap tidak pernah salah, pengayom masyarakat, mempunyai bakat memerintah karena tetesan keturunan dan dengan sendirinya berwibawa juga. Terutama di Kabupaten Wajo bagi desa-desa sampel, faktor keturunan bangsawan mewarnai pemilihan langsung, bebas rahasia oleh rakyat dan juga mewarnai pemilihan dengan cara penunjukan dari atas (pola pertama dan pola kedua).

Seorang calon Kepala Desa pada desa-desa di Sulawesi Selatan, sampai sekarang berlaku dari sejak sebelum Pelita, faktor keturunan bangsawan atau bangsawan menengah tetap menjadi perhitungan. Apalagi jika orang yang berketurunan tersebut sudah mengalami pendidikan, meskipun tahu baca dan menulis, rupanya sudah dianggap memenuhi syarat untuk menjadi calon. Selain faktor keturunan, paling utama pula diperhitungkan adalah budi-pekerti, biasanya diwakili oleh perhitungan kepatuhan melakukan ibadah agama, oleh karena dianggap dengan beribadah itu budi pekertinya sudah baik. Faktor lain yang menjadi perhitungan, adalah calon tersebut putra desa, lahir di desa dan mempunyai sanak keluarga dalam desa. Meskipun orang itu kelahiran desa, tetapi sanak keluarga atau rumpun keluarganya kurang dalam desa, apalagi tidak terpandang dalam posisi-posisi sosial, calon itu pula kurang disenangi.

Pemilihan kepala desa melalui penunjukan dari atasan desa, kebanyakan memperhitungkan faktor-faktor tradisi di atas, selalu melihat Pasal 4 No. 5/1979 sebagai latar belakang si calon. Sampai mana Pelita sekarang ini, pemilihan kepala-kepala kampung; atau kepala lingkungan,¹ selain berlaku syarat-syarat pemilihan Kepala

desa, lebih dititik-beratkan kepada faktor keturunan dan kewibawaan calon Kepala Kampung tersebut, oleh karena dialah yang paling langsung berhubungan dengan rakyat. Orang yang akan diangkat menjadi kepala kampung, biasanya dicari pertalian keturunan atau orang yang mempunyai keturunan memerintah desa tersebut. Pengangkatan anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD), terdiri atas Ketua yang biasanya dirangkap oleh kepala desa, demikian pula sekretaris LMD dirangkap oleh sekretaris kepala desa. Anggota lain terdiri atas kepala-kepala kampung/ lingkungan ditambah dengan pemuka-pemuka masyarakat itu, biasanya diangkat oleh kepala desa atas dasar hubungan famili, tanpa melihat posisi sosialnya.

Pengaruh kepala desa terhadap rakyatnya, banyak ditentukan oleh cara pemilihannya, ditambah dengan jenis peranan yang diperankan, kemudian menyusul kekuatan administrasi pemerintahan yang didukungnya. Mengenai kepala desa yang diangkat atas dasar penunjukan, andaikata bukan karena kekuatan administrasi yang bersumber dari atas, maka mungkin jadi pengaruh itu akan tidak berarti dan kewibawaan pemerintah akan hilang. Ditambah lagi kepala desa yang diangkat itu berasal dari luar desa yang tidak mengerti tradisi budaya desa, datang di desa dengan penuh kebanggaan serta otorita yang ada dalam tangannya, kepala desa seperti ini akan mengusir rakyat keluar desa melalui jalan migrasi, berpindah ke wilayah lain. Tradisi budaya orang Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar sebagai suku-bangsa yang mendiami Sulawesi Selatan, kebanyakan mereka mengambil motive migrasi dan dorongan mereka untuk berpindah, adalah karena kondisi pemerintahan dalam desanya oleh kepala desa yang diangkat itu.

Kepala desa yang diangkat tanpa mengerti tradisi budaya desanya, ditambah lagi tidak mengerti dan menghayati tugasnya, maka partisipasi rakyat bagi pembangunan sukar diharapkan. Sebaliknya juga terjadi, kepala desa bersama aparatnya yang dipilih langsung oleh rakyat, kemudian disenangi dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, partisipasi spontan dari rakyat dan turut serta berswadaya bagi kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama swadaya mereka sendiri dalam membangun tempat-tempat ibadah dan bangunan untuk kesejahteraan umum.

Pengaruh Pelita di desa lewat cara pemilihan kepala desa yang diangkat, agaknya belum sesuai dengan tradisi budaya masya-

rakat. Peranan kepala desa seperti ini akan kandas di permukaan tanpa berakar pengaruhnya ke dalam sendi-sendi sosial dan biasanya diterima oleh rakyat sebagai suatu pemerintah yang ditakuti, bukan karena ia disegani. Kewibawaannya mengambang hanya sampai di pelupuk mata, tanpa kewibawaan itu merasuk hati-nurani anggota masyarakat. Pelaksanaan Pelita di daerah sering mengalami hambatan, tanpa disadari oleh pemerintah atasan desa, bahwa faktor sosial dan faktor tradisi yang dihormati penduduk merupakan hambatan yang abstrak, meskipun bagaimana padunya sistem administrasi pemerintahan. Dengan demikian pengaruh Pelita terhambat, karena dari dalam dirinya sendiri yang senantiasa ingin akselerasi tanpa mengayomi masyarakat serta membimbingnya. Pancingan materi adalah amat tidak berarti bilamana faktor-faktor non materi tidak dirawat lebih dahulu. Sarana gedung dan *input-input* baru dari luar desa, memang sebagiannya dapat memancing partisipasi dan swadaya, tetapi sarana dan bangunan akan terlantar di kemudian hari tanpa rawatan dari penduduk, apalagi jika penduduk diharapkan mengawasinya. Pembangunan yang terlalu dipaksakan dari luar desa, akan terjadi pembangunan gugus pemerintah dan pembangunan gugus rakyat. Inpres adalah hasil gugus pemerintah dan bangunan swadaya adalah hasil gugus rakyat. Bangunan gugus rakyat adalah milik rakyat, sedang bangunan gugus pemerintah adalah milik pemerintah. Rakyat mengawasi dan merawat miliknya sendiri, meskipun disadari bahwa dana Inpres itu adalah uang rakyat juga melalui penarikan pajak dan hasil-hasil lainnya dari bumi Indonesia. Peranan seperti ini masih sering kita dengar secara sayup-sayup dari rakyat tanpa mau sibuk sendiri mengurus segalanya.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Pemimpin masyarakat non pemerintah, dimaksudkan di sini adalah pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa pula disebut *non-formal leader*. Berlawanan dengan *non formal leader* adalah *formal leader*. *Formal leader* adalah pejabat-pejabat pemerintah yang berada pada tingkat desa atau pun di atasnya, sedang *non formal leader* pada umumnya berada di desa, berada di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Mereka menjadi pemuka karena

adanya suatu identifikasi pada dirinya dari pandangan masyarakat menurut nilai-nilai budaya yang berkembang dalam desa, apabila masyarakat desa mempunyai lapangan kerja di bidang pertanian, maka pemuka yang dipilih dan dianggap mewakili pola-pola budaya masyarakatnya adalah mereka yang ahli tentang pertanian dengan segala aspeknya. Tokoh itu ahli tentang perbintangan atau ahli nujum, ahli tentang penyakit hama tikus, yaitu ahli membasmi penyakit tersebut, mereka ahli tentang hari baik dan hari buruk untuk memulai turun sawah. Demikian pula, bilamana masyarakat desa mempunyai lapangan kerja kebanyakan di bidang penangkapan ikan (nelayan), maka yang dipandang sebagai tokoh adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kewibawaan ilmu tentang lautan. Ahli menenangkan topan, dapat mendamaikan ombak keras, tahu tentang seluk-beluk perahu dan ahli pula tentang seluk-beluk pelayaran. Lapangan kerja yang utama penduduk Sulawesi Selatan ialah pertanian dan nelayan, sehingga tampak pemuka-pemuka masyarakat terdiri atas dan berdasarkan lapangan kerja ini. Setelah dasar pandang mengenai pemuka masyarakat berdasar lapangan kerja, barulah mengikut nilai-nilai agama, kecerdasan dan keterampilan, keberanian dan kekayaan. Akumulasi nilai-nilai tradisional tersebut pada orang, akan mengangkat seseorang menjadi pemuka dengan kewibawaan tertentu yang dimilikinya. Pemuka masyarakat tersebut adalah merupakan elite desa.

Setelah Pelita berlangsung, berbagai hal dalam tradisi sudah berubah, oleh karena perubahan tingkat pendidikan, perubahan sarana dan prasarana, bahkan beberapa sarana kehidupan sudah berubah. Perubahan revolusioner terjadi akibat terbukanya desa-desa yang terpencil oleh adanya hubungan jalan-jalan desa menembus sampai ke tempat-tempat terpencil yang dahulu hanya dapat dicapai dengan kendaraan kuda atau jalan kaki yang amat berat. Sekarang, sesudah Pelita berlangsung beberapa tahun, berhasil jalan-jalan dimanfaatkan oleh penduduk, maka secara perlahan-lahan pandangan dan pengalaman penduduk terbuka oleh adanya komunikasi ke pusat-pusat fasilitas melihat berbagai hal yang baru, sejak dahulu belum pernah dilihatnya. Memanfaatkan pusat-pusat fasilitas, di samping berkomunikasi dengan famili, sahabat dan handai tolan berarti terjadi komunikasi tatap-muka yang lebih akrab, menambah pengetahuan mereka yang akan tersimpan dalam perbendaharaan batinnya, sehingga tergoyah memuji hasil-hasil pembaharuan itu.

Selain sarana perhubungan yang mengalami perubahan, berbagai hal dalam bentuk barang yang memasuki desa, di samping penduduk melihat jenis barang itu di pusat-pusat kota, maka tadinya sebelum Pelita pandangan dan kepercayaan yang mengikat pikirannya pula sudah terbuka. Kepercayaan tentang adanya kekuatan sakti dan *magis-religious* mulai pula mengalami perkembangan baru dalam alam pikiran penduduk.

Demikian perubahan pandangan dan pengalaman terjadi hasil proses pembangunan. Lambat laun, norma-norma sosial mulai bergeser fungsi dan nilai-nilai budaya turut secara perlahan-lahan bergeser atau beralih fungsi atas adanya penterjemahan nilai-nilai guna mentransfer ke dalam pola-pola tingkah laku. Akibat dari pergeseran fungsi dan perubahan pandangan anggota masyarakat, maka pengangkatan pemuka dan tokoh masyarakat sebagai *formal leader* itu pula sudah bergeser. Apa yang tadinya sebelum Pelita dianggap pemuka, sekarang sudah dianggap suatu faktor dominan, melainkan faktor tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibarengi kemampuan pribadi mengelola tugas-tugas sosial.

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai elite sosial sekarang, baik yang lahir sesudah Pelita maupun sebelum Pelita, kategori-kategori penilaian sedang mengalami transisi. Sementara pemimpin masyarakat non-pemerintah belum habis, pemimpin dari pihak pemerintah pun belum terbentuk secara sempurna. Elite formal ini lupa akan nilai-nilai tradisi, sementara ingin berpegang pada nilai-nilai budaya yang sedang berubah akibat Pelita, tidak mampu pula mencapainya. Bukan saja *non-formal leader* yang mengalami transisi, *formal leader* pula sedang mengalami transisi.

Sehubungan dengan para administrator, bahwa mereka sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan dan latar belakang mereka, sehingga partisipasi yang dimintanya juga tidak akan terlepas dari kebiasaan mereka meminta partisipasi dari lingkungan adatnya. Sebagai administrator merasa tergolong elite, apakah mereka tergolong elite resmi atau tidak resmi, di sini tidak dipersoalkan. Di dalam desa-desa sampel, bahwa ciri elite itu ditentukan oleh faktor wewenang sosial, wewenang politik dan wewenang ekonomi. Warisan budaya desa-desa sebagai masyarakat yang memiliki ciri tradisional, maka dalam struktur masyarakat desa dalam hubungan antara rakyat dengan elitennya, terdapat hubungan *a sense of mutual obligation and dependence*, hal mana hubungan ini tidak

terdapat pada elite baru muncul hasil Pelita, yaitu mereka itu adalah biasanya ditentukan oleh wewenang ekonomi ataupun politiknya untuk menduduki jabatan elite itu. Dengan demikian terjadilah perubahan hubungan antara elite formal dengan elite tradisional, bahkan adakalanya elite tradisional menjadi korban atas politik dari elite formal.

Masyarakat desa adalah petani, maka nilai utama yang dihayati adalah biasanya ditentukan oleh ritma alamnya dan kesadaran akan nama baik anggota keluarga dan lingkungannya. Hubungan kewenangan di desa merupakan masalah nilai turun temurun, maka hubungan dengan elite desa akan berjalan secara transendental atau terdapat hubungan spiritual. Unsur hubungan dalam kata lain mempunyai kharisma, di mana belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku-pelaku proyek dalam Pelita. Pemahaman terhadap ritme hidup petani, agama dan kepercayaan-kepercayaan yang saling berkait dan mempunyai hubungan erat dengan kehidupannya sebagai petani atau nelayan. Petani mencintai tanahnya dan akan berdedikasi terhadapnya. Tanah adalah segala-galanya, bukan saja hidup memerlukan tanah, mati pun memerlukan tanah seenggala. Elite desa adalah mereka yang mengetahui dan menyadari tradisi budaya desa, serta menyadari pula peranannya dalam irama kehidupan masyarakat desanya. Hal demikian ini kurang disadari oleh *formal leader*, karena mereka adalah elite baru.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan modern yang biasanya aturan-aturannya sudah dituangkan dalam undang-undang, bahwa pemimpin perlu mengadakan perubahan kalau perlu dengan menguntungkan, maka bagi elite tradisional tidak menyetujui adanya perubahan dan penyebaran idea baru. Dalam hal ini, elite tradisional menghadapi ide baru itu dengan tiga kebiasaan, yakni : a. Curiga terhadap idea baru dan menolaknya, kemudian kembali berpegang pada tradisi lama; b. Kecurigannya itu berusaha menghindarinya, mungkin dengan pindah negeri; c. Tidak perlu curiga dan tidak ikut pula partisipasi, mereka diam saja.

Akhir-akhir ini, tampak makin hari makin kurang diperoleh pemuka atau tokoh tradisional lagi, seperti yang tadinya ulama dianggap sebagai pemuka, sekarang hampir-hampir sudah langka diperoleh. Pada umumnya yang dianggap pemuka sekarang adalah kepala desa sendiri bersama dengan aparatnya. Merekalah yang sering tampil memberi petunjuk-petunjuk kepada penduduk dengan

bahasa pembangunan dan mengenai pembangunan. Apa yang dibicarakan oleh mereka adalah masalah kesejahteraan, pembinaan budi pekerti, kebaikan pendidikan, pengaturan tata kehidupan dan sebagainya. Agaknya apa yang disampaikan oleh para pelaksana pembangunan itu atau dalam kata lain elite desa sebagai *formal leader* sama saja yang selalu disampaikan oleh para ulama sebagai *non-formal leader*. Hanya ulama memberikan pada dakwahnya dengan nafas keagamaan, sedang kepala desa dengan nafas pembangunan. Keduanya sama bertujuan untuk kepentingan umum dan untuk kemaslahatan penduduk.

Pemuka masyarakat dalam kalangan petani, sering disebut *Puang Matuwa* di daerah Wajo, *Tomina* sebagai ahli adat di Tana Toraja. *Matoa tani* dan *Matoa pakkaja*, masing-masing pemuka di bidang pertanian dan pemuka di bidang nelayan. Mereka berperanan dalam menentukan hari baik dan hari buruk untuk turun sawah atau pergi berlayar. Mereka memberi petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara bertani agar terhindar dari hama penyakit dan bagaimana cara menyimpan padi agar bisa membawa berkat dimakan sekeluarga. *Tomina* di Tana Toraja, selain perannya di berbagai lapangan kehidupan penduduk, mereka pula membimbing terselenggaranya upacara, baik upacara *Rambu Tuka* ataupun upacara *Rambu Solo*. Orang Toraja yang mempunyai kepercayaan Aluq Todolo, hampir dari semua tahap kehidupannya senantiasa diikuti oleh upacara. Peranan *Tomina* sebagai pemuka masyarakat sangat besar, oleh karena menyangkut perannya itu pada semua aspek-aspek kehidupan orang Toraja, berarti tanpa *Tomina* maka semua makna hidup tidak ada artinya. Hubungan *Tomina* dengan elite desa dalam masyarakat Toraja terjadi saling mengait dan saling menentukan, oleh karena upacara pemakaman misalnya, tidak saja ditentukan oleh kepala desa, akan tetapi lebih penting artinya penentuan dari *Tomina*.

D. KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON-POLITIK

Pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan amat segera kelihatan perubahan-perubahan atas pengaruh yang dibawanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang masyarakat Indonesia pernah menganut multi-partai dan sekarang setelah diadakan penyederhanaan, ter-

hitung dari pemilihan umum 1971, kemudian Pemilu 1977 organisasi politik berangsur-angsur pula disederhanakan dan dimantapkan, terutama organisasi politik pengikut Pemilu, diarahkan pada orientasi pembangunan. Persoalan yang banyak dipersoalkan, ialah bagaimana rakyat diajak turut serta dalam keputusan-keputusan politik. Keputusan-keputusan politik melalui konversi, dikaitkan kembali dengan citra rakyat, oleh karena itu harus melibatkan rakyat.

Pandangan sementara, bahwa Pemilihan Umum dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis partisipasi politik dari anggota masyarakat. Sejarah politik bangsa Indonesia, terlihat adanya krisis partisipasi yang pada hakekatnya disebabkan oleh :

1. Asal logika formal, bahwa supra-struktur politik dibentuk tanpa melibatkan ikut sertanya rakyat, sehingga kebijaksanaan yang diambil dirasakan kurang ada ikatan hatinya, dirasa bukan miliknya;
2. Keputusan-keputusan politik dari supra-struktur politik itu diharapkan mengikat dan dapat dipaksakan kepada rakyat, ternyata adanya kotak-kotak primordial yang sempit menyebabkan tidak mendapat respons dari rakyat;
3. Apatisme yang muncul akibat keadaan yang dipaksakan, sehingga seringkali muncul manifestasi ekstrim berupa demonstrasi;
4. Tuntutan kebutuhan akibat pembangunan makin melebar dan beraneka ragam yang tidak mendapatkan wadah dalam supra-struktur politik, sehingga tampak tuntutan lebih bedas dari pada kapasitas sistem nasional, akhirnya tujuan untuk mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

Gangguan-gangguan terhadap sistem politik akibat dari krisis partisipasi ini, lewat berbagai macam kekuatan yang berada di sektor kehidupan politik rakyat mewujudkan instabilitas pemerintahan di desa dan instabilitas politik. Hal ini mempunyai implikasi lebih luas dan berlanjut terus, seperti terbengkalainya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kecerdasan rakyat dan pertumbuhan kesejahteraan pada umumnya. Aparat pemerintah tidak

cukup waktu untuk mengatur ketenangan kerja para pejabat dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian sebagai pandangan umum sekedar konstataasi adanya krisis partisipasi yang terjadi di dalam sejarah politik dan sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu adanya pemilihan orientasi baru untuk merubah dari orientasi kekuatan menjadi orientasi pada program memang sangat diperlukan. Perubahan itu tidaklah mudah, oleh karena harus didahului perubahan konfigurasi masyarakat secara menyeluruh yang didasarkan pada pola tertentu. Mungkin dapat disadari bahwa sistem multi partai yang dianut oleh masyarakat yang sedang berkembang adalah hanya membuat krisis saja secara relatif dari pada yang menganut sistem satu partai atau dua partai. Akibat dari adanya krisis partisipasi itu bukan saja organisasi politik resmi yang diawasi oleh pemerintah akan mengalami instabilitas, terutama lagi tampak organisasi non-politik juga lebih tidak bergairah. Apakah hal ini akibat pengaruh Pelita yang berprinsip akselerasi pembangunan, meskipun organisasi non-politik itu terbunuh secara semena-mena.

Di daerah pedesaan, khususnya di Sulawesi Selatan mengenai masalah ini sebelum Pelita, organisasi politik seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan IPKI tumbuh dengan gairahnya, sejalan pula dengan sistem multi partai yang dianut pada masa itu. Sementara organisasi non-politik seperti yang bersifat sosio-religius, yaitu Muhammadiyah dan yang bersifat sosial saja, yakni PGRI dan Soksi menyangkut lapangan kerja anggotanya. Organisasi olah raga dan kesenian sebelum Pelita tumbuh dengan subur, mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat. Selain itu, berbagai pula asosiasi tumbuh sebagai wadah pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat.

Pengaruh pelaksanaan Pelita di pedesaan, terutama organisasi politik lebih menonjol sampai sekarang ini adalah GOLKAR di samping Parpol Islam bagi masyarakat yang beragama Islam dan PDI terutama bagi masyarakat Toraja yang sebagian besar beragama Kristen. Sedang organisasi non-politik di pedesaan sejak Pelita tampaknya dari tahun ke tahun makin mengecil dan berkerut. Satu-satunya organisasi non-politik yang bekerja atas dasar agama ialah Muhammadiyah, lebih menonjol di desa-desa Kabupaten Bulukumba dan Wajo. Organisasi non-politik lainnya dan baru saja

mengaktifkan dirinya adalah SOKSI sedang memperbaharui batang tubuhnya dan berangsur-angsur merebut pengikut. Pengamanan jalannya pembangunan, memang perlu disadari bahwa hanya dengan penertiban tingkah laku politik yang dapat menunjang kelajuan pembangunan.

Langkah-langkah pembangunan dalam segala sektor, hanya mungkin dikerjakan dengan adanya stabilitas sebagai syarat mutlak. Dewasa ini dirasakan bahwa pembangunan bidang ekonomilah yang diprioritaskan, akan tetapi tahap-tahap Pelita berikutnya bidang-bidang sosial-politik sudah diperhatikan juga. Terutama dapat diamati bahwa orientasi pemerintah lebih memperhatikan harmoni perkembangan kedua bidang tersebut secara serempak. Akhir dari lukisan pada sub bab ini, bahwa pengaruh pelaksanaan Pelita di pedesaan menyebabkan kegairahan berorganisasi dari anggota masyarakat terpendam, bahkan sebagiannya, menjadi apatis, tidak mau turut campur urusan orang lain, tidak mau banyak pusing, cukup dengan mengusahakan mata-pencaharian untuk ketenteraman sekeluarga. Orang yang sibuk mengurus politik dianggapnya sibuk sendiri, apa yang mereka usahakan tokh hasilnya akan jatuh pada orang lain, demikian kata-kata sindiran yang sering dilemparkan sebagian anggota masyarakat. Keadaan ini disebabkan kurang-sadaran terhadap arti politik dan mungkin juga kurang pendidikan politik bagi rakyat. Selain dari pada itu, sebagiannya disebabkan sistem monolitik yang lebih banyak dipraktekkan di dalam masyarakat.

B A B V

P E N U T U P

A. RANGKAIAN ISI

Propinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 23 kabupaten, yaitu 21 berstatus Daerah Tingkat II dan dua buah kota madya. Ibu kota dari Dati II tersebut masing-masing mempunyai latar belakang sejarah dan proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang berstatus afdeling dan ada pula ibu kota onder-afdeling. Selanjutnya di seluruh Sulawesi Selatan terdapat 169 kecamatan yang meliputi 1.170 buah desa. Sama halnya Dati II, maka masing-masing kecamatan dan desa mempunyai latar belakang sejarah pembentukan yang berbeda-beda, yaitu dahulunya terbagi dalam beberapa kampung atau namanya lembang di Tana Toraja, kemudian digabungkan ke dalam satu desa, dan sebagian pula dari kampung menjadi desa. Desa-desa digabung yang terpencar, digabung dalam satu kecamatan menurut letaknya secara strategis dapat dijangkau oleh unit pemerintahan. Ada pula yang melalui pemekaran dari unit pemerintahan sebelumnya. Pada masa raja-raja di Sulawesi Selatan, desa-desa yang menjadi lokasi penelitian terdapat di antaranya bekas kerajaan kecil, seperti Gattareng di Bulukumba dan Pangli Palawa di Tana Toraja.

Dalam penelitian ini, ada sembilan buah desa menjadi Desa sampel, yaitu tiga buah desa di Kabupaten Tana Toraja ialah Desa Pangli Palawa, Sesean Suloara dan Desa Saodan Mataallo. Desa sampel di Kabupaten Wajo, ialah Desa Sompe, Ana'banua dan Desa Tancung, sedang di Kabupaten Bulukumba, ialah Desa Gattareng,, Dampang dan Desa Matekko. Tiga buah kabupaten dianggap dapat mewakili empat suku bangsa di Sulawesi Selatan, yakni Tana Toraja dapat mewakili desa-desa orang Toraja dan Mandar, dan Kabupaten Wajo dapat mewakili pemukiman orang Bugis, sedang Kabupaten Bulukumba bagi orang Makassar. Kabupaten Tana Toraja terletak di bagian Utara jazirah Sulawesi Selatan dan berada di dataran tinggi, daerah Wajo berada di bagian tengah dan terletak di dataran rendah, sedang Kabupaten Bulukumba berada di bagian Selatan

jazirah terletak di dataran rendah serta pinggir pantai.

Penduduk Sulawesi Selatan kebanyakan beragama Islam, terutama mereka terdiri atas suku bangsa Bugis, Makassar dan Mandar, sedang suku bangsa Toraja sebagian beragama Kristen dan sebagian besar masih menganut kepercayaan *Aluq Todolo* (kepercayaan terhadap nenek moyang). Jumlah penduduk dalam tahun 1976 adalah 5.6 juta jiwa lebih. Hal ini berarti hanya sebanyak 4% dari penduduk Indonesia. Proyeksi penduduk untuk tahun 1986 sebanyak 6.7 juta dan tahun 1991 diperkirakan berjumlah 7.4 juta, jika program KB berhasil baik.

Perluasan pendidikan sangat cepat, terutama sesudah Pelita. Pendaftaran di sekolah taman kanak-kanak lebih-lebih di sekolah dasar dan sekolah lanjutan baik yang berstatus negeri dan subsidi maupun swasta meningkat terus. Pendaftaran pada sekolah-sekolah dasar meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan adanya Inpres Sekolah Dasar. Dibanding dengan keadaan pendidikan sebelum Pelita, agaknya perkembangan kecerdasan rakyat amat cepat laju perkembangannya.

Mengenai struktur pemerintahan sebelum Pelita, masih bagiannya mengikuti atau mengalami peralihan struktur pemerintahan raja-raja dahulu, yaitu mencerminkan adanya suatu kekuasaan mutlak. Kepala wanua di daerah Wajo dan kepala lembang di Tana Toraja, setelah penjajahan diganti menjadi kepala distrik, tetapi sebagian wanua dijadikan kampung. Kepala wanua kemudian tingkat di bawahnya lagi dikenal istilah kampung dan di bawah kampung tidak dikenal adanya pembagian seperti RK/RT. Aparat kampung dikenal Sareang yang berfungsi membantu kepala kampung dalam menjalankan tugasnya. Pemugaran desa-desa di Sulawesi Selatan terjadi dalam tahun 1962, di mana kampung digabungkan menjadi sebuah desa, kemudian beberapa desa yang mempunyai latar belakang sejarah yang sama digabungkan menjadi sebuah kecamatan. Sebagian lagi desa-desa yang sama sejarahnya, tetapi berbeda keadaan geografisnya, maka dipisah kepada satu kecamatan yang berbeda. Penggabungan dan pemisahan kampung dan lembang itu sesudah Pelita, memang merupakan suatu perubahan yang dirasakan oleh penduduk sebagai suatu perubahan komuniti, bahkan diartikan sebagai perubahan pemukiman. Kebiasaan mendirikan tempat kediaman harus berdekatan kampung atau berdekatan pemukiman dengan sanak keluarganya. Adakalanya terjadi dalam penggabung-

an dan pemisahan itu, pemukiman yang terbiasa dilakukan oleh penduduk menjadi renggang. Akibat dari padanya terjadi berbagai macam konflik atau integrasi sesamanya. Perubahan struktur membawa perubahan komuniti, sekaligus membawa perubahan adat-kebiasaan mengenai sistem pengetahuan tentang pemukiman, tentang wilayah dan perubahan pandangan tentang sejarah pemilihan tempat tinggal tersebut.

Pada umumnya demokrasi desa, khusus cara-cara pemilihan kepala desa senantiasa dilakukan melalui cara memilih atas dasar kebebasan dan menurut keikhlasan. Cara pemilihan itu dilakukan dalam dua pola. Pertama, dipilih calon sekurang-kurangnya tiga orang, kemudian dipilih oleh rakyat yang berhak memilih. Siapa yang terbanyak di antara ketiganya itulah yang dimajukan kepada kepala distrik. Pola kedua, ialah tidak ada ketentuan harus memilih lebih dahulu calon, tetapi memang sudah konsensus bahwa calon-calon yang bersedia tidak begitu banyak. Pada hari pemilihan datanglah rakyat di tempat pemilihan dengan memasukkan batu-batu di kotak di mana tertulis calon atau berupa warna. Di daerah Bulukumba, tidak digunakan batu-batu, tetapi masing-masing orang menulis kemudian dimasukkan dalam amplop yang selanjutnya dimasukkan dalam kotak yang diinginkan. Siapa yang terbanyak pemilihnya, maka namanya yang dimajukan kepada kepala distrik. Cara pemilihan ini terjadi sebelum Pelita, bahkan berlaku sampai pada Pelita pertama. Setelah memasuki Pelita kedua, lebih-lebih dalam Pelita ketiga, maka tidak ada lagi kepala desa yang dipilih, akan tetapi langsung ditunjuk oleh kepala kecamatan.

Apa yang dimaksud pemimpin masyarakat non-pemerintah atau pemuka masyarakat sebelum Pelita amat memegang peranan dalam mengayomi anggota masyarakat. Mereka dipandang sebagai gantungan hati, *opinion leader* dan tempat orang mencurahkan perasaannya mengenai susah dan senang dalam kehidupan. Jauh sebelum Pelita di Sulawesi Selatan, paling berpengaruh adalah ulama yang dalam bahasa Bugis disebut *Anregurutta*. Selain ulama, adalah mereka yang ahli tentang pertanian yang disebut *Matowa Pallaonruma* dan ahli tentang keuletan yang disebut *Matowa Pakkaja*. Turut terpandang pula adalah mereka yang ahli atau arsitektur rumah tradisional yang disebut Panre bola. Ulama yang pekerjaannya memberi pengajian, memberi dakwah dan memberi

petunjuk-petunjuk itu dianggap pemuka yang keramat atau sekurang-kurangnya terhormat di kalangan masyarakat.

Pemuka masyarakat tradisional seperti tertera di atas tadi, setelah Pelita dan terutama setelah perubahan-perubahan terjadi hasil pembangunan, pemuka masyarakat tersebut secara berangsur-angsur tergeser dan mereka pula berangsur-angsur mengubah lapangan kerjanya, sekaligus dengan peranannya. Di lain pihak sesudah Pelita muncul pemuka baru yang biasa juga disebut elita baru. Mereka itu membawakan aspirasi pembaharuan. Mereka tampil sebagai pembaharu, oleh karena mereka berada di dalam struktur pemerintahan. Terpandang di kalangan masyarakat, karena melaksanakan instruksi pembangunan. Berhubung karena elita baru ini seringkali muncul memberi petunjuk dan pengarahannya entang kemashlahatan hidup, maka mereka pula secara berangsur-angsur memperoleh julukan sebagai tokoh, apakah mereka juga dipandang sebagai pemimpin non-pemerintah, sering tidak dapat dipisahkan. Rupanya dewasa ini, jika kita ingin mencari pemuka non-pemerintah sudah agak langka, agaknya sudah ditelan oleh kegiatan-kegiatan itu oleh pemuka yang berada dalam struktur. Secara tradisional, ciri-ciri seorang pemuka ialah ia harus memiliki kejujuran, keikhlasan dalam mengabdikan, berani dan bertanggung jawab, baik budi pekertinya dan bertaqwa kepada Tuhan. Ciri-ciri seorang pemuka dalam Pelita, memang disebut pula ciri-ciri tradisional ini, tetapi dalam pelaksanaan sering ditinggalkan atau sekurang-kurangnya diperhalus. Pelita menuntut seorang pemuka untuk cerdas, trampil, berani dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan melemahnya pandangan terhadap tokoh atau pemuka masyarakat yang menjadi *opinion leader*, selain dengan itu pula organisasi non-politik turut pula menjadi lemah, bahkan di pedesaan hilang secara perlahan-lahan. Tadinya sebelum Pelita yang banyak giat mengorganisasikan anggota masyarakat adalah mereka *opinion leader* itu, mereka didengar dan ditaati. Sekarang tergeser bersamaan tergesernya nilai-nilai yang mendukungnya akibat pembaharuan. Organisasi politik yang aktif adalah organisasi GOLKAR tampak di semua desa penelitian, sedang organisasi non-politik hanya yang bernafaskan agama dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat keseluruhannya lebih-lebih dalam Pelita ketiga ini dididungkan. Perkembang-

an lembaga-lembaga setempat biasanya dalam alam tradisional disesuaikan dengan situasi, tetapi sebagai akibat perubahan, maka lembaga-lembaga ini mengalami perkembangan baru di desa. Pembangunan masyarakat desa, harus lebih utama diarahkan ke bidang agraria, di mana diharapkan perkembangan-perkembangan baru tidak terlalu menyeret hilangnya rasa aman dan rasa terlindung. Pembangunan ekonomi semata, sering mengantarkan pembaharuan ke arah persaingan yang tidak sehat, akibatnya akan mengarah pada tidak aman dan rakyat tidak merasa terlindung, bahkan persaingan membawa kerenggangan antara keluarga dan se-desa.

Masalah kerenggangan sosial mempunyai akibat besar terhadap kehidupan generasi baru. Anak yang dididik dalam alam tradisional, memang sedikit kemampuannya untuk berkembang karena dikuasai oleh pandangan ke-tua-an, namun demikian dalam suasana kekuasaan ke-tua-an itu, anak merasa terlindung dan rasa aman. Pembangunan manusia seutuhnya adalah menempuh dimensi-dimensi berbagai kehidupan. Memang nilai ekonomi menjadi pusat, akan tetapi nilai ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia harus ditunjang dari nilai-nilai non ekonomi. Apabila nilai-nilai non-ekonomi itu sudah terbiasa dilakukan oleh anggota masyarakat, maka faktor-faktor itu akan menjadi milik masyarakat pula.

B. KESIMPULAN

1. Sejak Pelita telah terjadi perubahan masyarakat, terlihat dari perubahan kesejahteraan hidup dan mutu-hidup secara perlahan-lahan membaik. Memang Pelita sampai sekarang mengusahakan sektor pertanian lebih utama dan sekarang hasil-hasil tersebut telah mengangkat derajat kehidupan masyarakat desa.
2. Pembaharuan dalam struktur pemerintahan, membawa pengaruh pada masyarakat dan administrasi pemerintahan itu sendiri. Pengaruh terhadap pandangan masyarakat atas perubahan struktur itu, bahwa warga desa terbuka dari kebiasaan lama hasil warisan sejarah raja-raja atau penjajahan. Para aparat pemerintahan mengalami perubahan karena keterampilan dan pengetahuan bertambah, terutama pengetahuan tentang peren-

canaan dan cara-cara melaksanakan rencana itu. Kelihatan tumbuh kewajiban-kewajiban atas kesadaran sendiri dan kegiairan untuk hidup di masa depan. Orientasi ke masa depan dan memikirkan hari besok sudah disadari kegunaannya. Hal ini merupakan suatu tanda untuk maju, terutama kecenderungan lebih tinggi terhadap pentingnya pendidikan anak-anaknya. Warga desa juga sudah tambah lebih kritis memikirkan seluk beluk kehidupannya, memikirkan serta rencana pekerjaan anak-anaknya. Adanya Inpres SD di desa memberi tekanan kuat terhadap aspirasi pendidikan dan kemajuan bagi generasi mudanya, kemudian diikuti oleh perbaikan sarana produksi dan lebih utama karena dilaksanakannya sarana komunikasi.

3. Cara-cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa, sejak Pelita lebih banyak dilakukan dengan penunjukan atas dasar bahwa orang yang ditunjuk itu memenuhi syarat, seperti adanya kewibawaan, kejujuran, kepintaran dan keterampilan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Kedudukan dan peranan pimpinan masyarakat desa non-pemerintah, sejak Pelita berangsur-angsur menipis, terganti oleh pemimpin Orde Baru yang kebanyakan mereka berada dalam struktur pemerintahan. Elite baru ini, sering tidak dapat disamakan dengan *opinion leader* dari pemimpin tradisional sebelum Pelita. Pemimpin masyarakat non-pemerintah berubah sejalan dengan perubahan struktur pemerintahan. Oleh karena pengaruh struktur terhadap perkembangan sistem sosial dan sistem budaya, maka pandangan dan pergelaran terhadap permukaan masyarakat rupanya berkumpul pada pemimpin formal. Apa yang disebut pemimpin informal tampaknya makin kurang peranannya.
5. Sejalan dengan menipisnya pandangan terhadap pemimpin non-pemerintah, maka melemah pula keadaan organisasi non-politik. Sebelum Pelita, mereka yang berada dalam kedudukan sebagai pemimpin non-pemerintah yang menguasai organisasi non-politik itu, maka semenjak Pelita peranan mereka berkurang. Kegiatan Pelita memunculkan elite baru yang disebut elite pembaharuan. Organisasi politik atau yang turut berpolitik,

rupanya bisa berjalan karena sebagiannya didukung oleh pejabat yang berada dalam struktur pemerintahan. Tanpa dukungan aparat pemerintah, maka organisasi itu akan berjalan lambat, sebagaimana halnya Muhammadiyah, karena bernafas keagamaan ia didukung oleh warga desa atas dorongan rasa keagamaan. Organisasi sosial tumbuh secara sederhana, meskipun ia sebagai wadah mengembangkan kebutuhan anggota masyarakat, namun perhatian warga desa tidak cukup waktu mengikutinya dari pada mengorbankan waktunya bagi pengelolaan lapangan hidupnya.

DAFTAR BACAAN

1. Abdullah, Taufik, 1974. *Masalah Sejarah Daerah dan Kesadaran Sejarah*, Bulletin Yayasan Perpustakaan Nasional I No. 2 Agustus 1969.
2. ----- 1979. *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gadjah Mada University Press.
3. ----- 1974. *Islam di Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
4. Burger, D.H. Prof. Dr, 1960. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia I*, Pradnya Paramita d/h J.B. Woiters, Djakarta.
5. Breese, Gerald, 1966. *Urbanization in Newly Developing Countries*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
6. Cense, A.A., 1961. *Enige Aantekeningen over Makassar – Boegineese geschiedrijving*, BKI.
7. Hamka, 1961. *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV, Nusantara, Bukittinggi, Jakarta.
8. Foster, George, 1962. *Traditional Culture and the Impact of Technological Change*, New York.
9. Halpers, Joel M., 1967. *The Changing Village Community*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
10. Mulyono, Slamet, 1968. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*.
11. Inkeles, Alex, 1966. *Readings on Modern Sociology*, Prentice-Hall Inc., Englewood, New Jersey.
12. Parsons, Talcott, 1951. *The Social System*, The Free Press, New York.
13. ----- 1957. *Economy and Society*, Routledge and Kegan Paul Ltd., London.
14. Susanto, Astrid S, 1977. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung.
15. Sartono Kartodirdjo, 1969. *Struktur Sosial dan Masyarakat Tradisional dan Kolonial*, Lembaran Sejarah No. 4 Yogyakarta.

Tidak diperdagangkan untuk umum

